



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH,
ACEH DAPIL ACEH TIMUR 2, ACEH DAPIL ACEH UTARA 5
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 30 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Timur 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Utara 5 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Adil Sejahtera Aceh

PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Muhammad Yusuf (Partai Keadilan Sejahtera)

PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Bulan Bintang

PEMOHON PERKARA NOMOR 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nanda Nurkhalis (Demokrat)

PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Nasdem

PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Bangsa

PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Subki Tgk. Jek (Partai Adil Sejahtera Aceh)

PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Aceh

PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Yanti Anggreyani (Partai Kebangkitan Bangsa)

PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

H. Hasbi Ahmad (Partai Kebangkitan Bangsa)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Selasa, 30 April 2024, Pukul 08.02 – 10.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah
Sharfina Sabila
Yunita Nurwulantari
Rizkisyabana Yulistya Putri**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Nopiyansah
2. Muhammad Anwar Sadat

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Sayuti Abubakar

C. Pemohon Perkara Nomor 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muhammad Yusuf

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Langen Subha Pangestu

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Parulian Siregar
2. Hatur irvan V. Pandiagan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Suluh Jagad

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maya Indrasari

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erizon S. Chaniago
2. Mahadir

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Moh. Fahrudin

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Suluh Jagad

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bakas Manyata
2. Dega Kautsar Pradana

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Suluh Jagad
2. Niko Krishna Arya Putra

M. Termohon:

1. Yulianto Sudrajat
2. Idham holik

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. Zana Zerlina
2. David Ronald
3. Rahman Ramli
4. Arif Effendi
5. Imam Munandar
6. Ridho Ary Azhari
7. Bambang Handoko
8. Imamul Muttaqin

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Busyraa

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Achmad Irsyad
2. Hanif Yudha Perwira

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erna Ratnaningsih
2. Aries Surya

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Dimas Satrio Budi Utomo
2. Aep Nuzuludin Anwar
3. M. Zainul Arifin
4. Muallim Bahar

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andy R. Wijaya
2. Dimas Satrio Budi Utomo

T. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Herwyn J. H. Malonda
3. Agus Syahputra
4. Fahrul Rizka Yusuf
5. Safwani
6. Sri Mulyani
7. Cut Aja M.
8. Said Aqil
9. M. Ramadhan
10. M. Taufiq

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]**

Kita mulai, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, pemilu legislatif, untuk daerah Provinsi Aceh dimulai. Sidang terbuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pihak sudah dipanggil dan tadi sudah diabsen, jadi tidak perlu diulang kembali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, tidak boleh terlambat dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Kemudian jangan berlalu-lalang, keluar/masuk, ya. Kalau ke toilet juga satu-satu, yang tertib. Kemudian yang sudah selesai juga tidak boleh pulang sebelum semua acara pada sesi ini berakhir, dan kalau ada perpindahan, Pemohon ke depan, supaya yang tertib, ya. Jadi kita bersama-sama jaga kewibawaan Mahkamah ini dalam persidangan panel ini.

Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Hadir Pemohon pada kesempatan ini, agenda kita adalah mendengarkan secara lisan Permohonan Pemohon, ya. Disampaikan secara singkat, karena Mahkamah telah mempelajari, bahkan sudah membuat kajiannya secara lengkap. Ini contoh semua Hakim Panel di 1, 2, 3, itu sudah punya kajian yang lengkap begini. Sehingga nanti tidak perlu disampaikan seluruhnya, tapi hanya pokok-pokoknya saja. Dan untuk menyingkat, saya akan pandu, ya. Kemudian dilanjutkan nanti Yang Mulia Prof. Anwar dan Yang Mulia Prof. Enny akan menanyakan yang belum jelas atau perlu ditanyakan, ya. Kemudian yang lain belum ada kesempatan untuk bereaksi atau merespons, kecuali yang diminta oleh Hakim.

Kemudian yang berikutnya, untuk acara-acara atau persidangan-persidangan berikutnya juga jangan sampai terlambat, ya. Kita mulai pukul 08.00 WIB, sebagaimana yang dijadwalkan atau sesuai dengan agenda pada waktu itu.

Sekarang, yang pertama dimulai untuk Provinsi Aceh ini, Perkara Nomor 153. Itu masih kosong di depan, kalau ada ... bisa, hadir. Siapa yang ada di depan? Ya nanti buka-buka berkasnya supaya lebih gampang, lebih baik duduk di depan, ya.

Ya, nanti sambil ... sambil jalan, ya. Begini, ada ... ada syarat formil. Syarat formil itu harus disampaikan pada waktu bersamaan dengan pengajuan permohonan. Jadi syarat formil, misalnya kalau perseorangan ada rekomendasi, itu merupakan syarat formil yang harus disampaikan bersamaan dengan permohonan. Kemudian nanti yang

harus direspons oleh Termohon, atau Pihak Terkait, atau Bawaslu adalah permohonan yang sudah di-upload. Ya, bukan ... jadi kan ada kesempatan permohonan pertama, kemudian ada perbaikan tiga hari, ti ... tiga, dua kali empat jam itu perbaikan permohonan. Nah, yang di-upload itu yang harus direspons oleh Pihak Terkait dan Termohon atau Bawaslu.

Pada waktu perbaikan permohonan, maka bisa terjadi, dimungkinkan terjadi dalam perbaikan itu ada perubahan dapil, pengurangan dapil, atau penambahan dapil. Tapi dalam persidangan ini yang sekarang ini karena itu sudah menjadi milik publik dan sudah di-upload, maka Pihak Termohon, Pihak Terkait itu membacanya adalah permohonan yang sudah di-upload itu, sehingga nanti responsnya berdasarkan apa yang sudah di-upload. Sehingga yang disampaikan dalam persidangan ini masih dimungkinkan, tapi perubahannya hanya renvoi minor, renvoi kecil. Tapi kecilnya misalnya begini, dipersoalkan angka-angka, terus kemudian diubah angkanya, misalnya 1.000 jadi 100, itu sudah tidak boleh karena itu menyangkut substansi. Tapi kalau misalnya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, di situ kurang nol saja, itu masih bisa direnvoi atau typo-typo kecil saja. Tapi ada hal-hal yang substantif, tidak boleh dilakukan renvoi lagi di dalam persidangan ini.

Kemudian yang berikutnya, karena yang direspons oleh Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah apa yang sudah di-upload, maka termasuk buktinya itu yang sudah ada, yang sudah masuk pada waktu mengajukan permohonan. Tapi ada sedikit apa ... diskresi yang bisa diambil, ada penambahan bukti, bisa dimungkinkan penambahan alat bukti. Tapi bukti itu sudah harus ada pada waktu mengajukan permohonan, ada dalam beberapa hal yang diajukan pada waktu permohonan hanya daftar bukti, kalau daftar bukti berarti belum ada alat buktinya itu, ya, sehingga kalau mau ditambahkan sekarang itu tidak bisa karena memang pada waktu itu belum ada alat bukti, ya. Waktu itu yang dimasukkan baru daftar bukti. Jadi prinsip, nanti kita beri kesempatan untuk menambah alat bukti, tetapi alat bukti itu nanti ada batasan waktu. Misalnya kita selesai ini persidangan jam berapa, nanti misalnya jam 13.00 WIB paling lambat, bisa ditambahkan alat bukti. Tapi bukan alat bukti yang sebelumnya tidak ada, kemudian ditambahkan. Artinya menambah, itu boleh. Tapi kalau tadinya hanya daftar, sekarang semuanya dimasukkan, itu bukan menambah, tapi itu alat bukti baru yang diajukan baru sekarang. Padahal sebetulnya itu menurut undang-undang, menurut PMK, alat bukti itu sudah harus masuk bersamaan dengan permohonan. Ya, gitu, ya? Menyangkut tadi yang disampaikan.

Ada lagi sebelum dimulai? Yang akan disampaikan. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [08:36]

Sedikit, Yang Mulia. Kalau misalnya, Mulia, kemarin misalnya pada saat kami menyerahkan perbaikan, terus beserta alat bukti itu, yang terjadi masalah teknis, maksudnya panitia saat itu menyampaikan bahwa alat bukti yang belum lengkap, silakan dibawa sebentar malam, karena waktu itu kami ada 2 dapil, satu provinsi, satu kabupaten. Kabupatennya bilang, "Nanti malam saja diantar." Pas diantarkan malamnya, itu ternyata panitia sudah ganti shift dan mereka enggak mau terima lagi. Padahal di daftar alat bukti itu ada.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:18]

Enggak, tapi itu anu begini, pada waktu menyerahkan Permohonan, sudah ada daftar dan alat buktinya sudah ada? Meskipun kurang.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [09:28]

Ada dari angka 1 ... P-1 sampai P-65, P yang enggak masuk (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Terus mau ditambahkan, tapi ... mau ditambahkan, tapi belum? Gitu kan? Kalau sekarang ini mau ditambahkan masih boleh.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [09:40]

Siap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:41]

Tapi waktu mengajukan Permohonan, sudah ada daftar dan alat bukti yang tidak lengkap, ya, kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [09:47]

Siap.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Mau ditambahkan sekarang? Boleh. Tapi nanti batas waktunya, ya, kita tentukan dalam persidangan ini, ya.

Ada lagi yang akan disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [09:58]

Ada, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:59]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [10:00]

Dari Pemohon, Perkara Register 54. Pada awal ... awalnya kami sudah menyampaikan daftar bukti dan bukti, tapi pada tanggal 26 Maret, Bawaslu RI membuat keputusan, sementara apa ... putusan itu sampai kepada kami tanggal 28 (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Ya, itu berarti kan nanti tambahan, kan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [10:24]

Tambahan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:26]

Kalau tambahan masih boleh.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [10:27]

Masih boleh. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:29]

Tapi pada awal ... awal mengajukan permohonan, sudah harus ada daftar dan alat bukti. Tapi alat buktinya itu dianggap belum lengkap. Kemudian ditambahkan pada setelah persidangan ini, boleh.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [10:41]

Boleh. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Nanti kita tentukan waktunya. Cukup, ya?

Baik, kalau cukup, sekarang kita mulai Perkara 153 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Kemudian Pihak Terkaitnya, Partai Aceh, ada? Hadir? Baik, Partai Aceh. Dan kedua, Partai Persatuan Pembangunan? Hadir? Baik, ya. Supaya semua mencermati ini, sehingga jalannya persidangan bisa berlangsung dengan cepat.

Perkara 153. Baik, silakan siapa Pemohonnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [11:23]

Izin, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:24]

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [11:25]

Terima kasih. Perkenalkan, Yang Mulia, kami Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini mewakili Partai Amanat Nasional akan membacakan Permohonan secara singkat. Permohonan dalam hal ini, Perbaikan Permohonan, pembatalan keputusan KPU ... kami ulangi, pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

Ya dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [11:57]

Kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:59]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:00]

Mahkamah, serta persidangan yang kami muliakan, kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Kewenangan, punya kewenangan enggak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:08]

Ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]

Ada. Kemudian tenggat waktunya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:12]

Kewenangan sebagaimana angka 1, halaman 4, kedudukan hukum Pemohon (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:17]

Enggak, tenggat waktunya dulu. Tenggat waktunya, gimana? Saudara mengajukan kapan itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:22]

Kami mengajukan, Yang Mulia, pada tanggal 23 Maret ... 20 Maret ... eh, maaf, Yang Mulia, kami melihat tanggal 23 Maret, kemudian Perbaikan kami ajukan di tanggal 26 Maret, pukul 12.59 WIB.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:38]

Oke, jadi masih dalam tenggat waktu, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:41]

Masih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:42]

Oke. Kedudukan Hukum, gimana mempunyai kedudukan hukum?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:47]

Kedudukan Hukum kami selaku peserta pemilu Nomor Urut 12.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:51]

Nomor Urut 12, ya? Punya kedudukan hukum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [12:54]

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Oke, tapi ini memang ada kekurangan sedikit, SK KPU mengenai penetapan partol tidak dicantumkan, tapi Saudara sudah, ya, dianggap sudah memiliki kedudukan hukum.

Baik, sekarang di Pokok Permohonan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [13:12]

Pokok Permohonan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:13]

Yang pertama itu perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil 2, ya? Dapil 2, Aceh, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [13:22]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Ya. Apa ini yang dipersoalkan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [13:24]

Yang dipersoalkan, Yang Mulia, adanya penambahan suara untuk ... dan ... ada penambahan dan pengurangan, penambahan untuk Partai Persatuan Pembangunan dan pengurangan untuk Partai Amanat Nasional.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]

Ya, berapa angkanya itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [13:41]

Angka untuk ... menurut Termohon, Pemohon itu mendapatkan suara 24.284, sedangkan menurut Pemohon itu 2.000 ... 24.413. Jadi ada selisih 129 suara, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:56]

Jadi ada selisih kurang 129, ya. Terus Partai Persatuan Pembangunan yang dipersoalkan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [13:58]

Selanjutnya penambahan untuk Partai Persatuan Pembangunan, menurut Termohon itu 25.348, sedangkan menurut Pemohon itu 24.362 suara atau ada penambahan 986 suara.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]

Ya, itu penambahan dan pengurangan terjadi di mana?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:19]

Terjadi di Kabupaten Pidie.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22]

Kabupaten Pidie?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:23]

Di Kecamatan Indra Jaya, Yang Mulia. Kecamatan Indra Jaya, kami uraikan di tabel 2 ini.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:30]

Sampai tabel 11.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:34]

Jadi, di Kabupaten Pidie, di Indra Jaya, Keumala, Sakti, Simpang Tiga.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:39]

Kecamatan Simpang Tiga.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:40]

Itu kecamatan-kecamatanannya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:41]

Ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]

Kemudian?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:44]

Untuk penambahan ini ada di Kecamatan Tangse, di kecamatan (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

Kembang Tanjong, Muara Tiga itu, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [14:58]

Kembang Tanjong dan Muara Tiga, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:00]

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:02]

Dan Meureudu, Kecamatan Meureudu juga ada penambahan.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:04]

Meureudu? Kabupaten Pidie Jaya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:10]

Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13]

Ya. Jadi ini persoalannya adalah penambahan dan pengurangan, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:17]

Ada penambahan dan pengurangan, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]

Di beberapa kecamatan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:20]

TPS dan kecamatan itu, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Terus, menurut Saudara, suara yang benar kalau begitu bagaimana?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:24]

Suara yang benar menurut kami, Yang Mulia, itu Pemohon atau Partai Amanat Nasional harusnya mendapatkan 24.413 suara. Sedangkan untuk P3 itu seharusnya mendapatkan (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:40]

Nomor Urut 10? Atau nomor urut berapa itu?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:42]

Di kursi ke-9.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]

Kursi ke-9, PAN mestinya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:42]

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Dengan perolehan suara 24.413?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:52]

24.413.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:53]

Kemudian P3?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:53]

P3=24.362.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:57]

360. Jadi berada di bawah PAN, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [15:59]

Posisi ke-10, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Posisi ke-10, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:01]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:02]

Untuk yang partai yang lain, tidak ada masalah, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:04]

Enggak ada, Yang Mulia, cuma dengan P3.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:05]

Jadi urutan pertama, Partai Aceh, Golkar, Partai Aceh yang ke-2, PKB, Gerindra, Adil Sejahtera Aceh, Nasdem, Demokrat di atasnya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:15]

Siap, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:16]

Itu enggak ada persoalan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:17]

Siap, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Jadi, Anda hanya mempersoalkan P3, ya. Ini untuk perhatian P3, ya, dan Termohon. Jadi, suara PAN merasa dikurangi, sedangkan Perkara Suara P3 bertambah. Ini persoalannya angka-angkanya sudah disampaikan.

Kemudian perolehan suara yang berikutnya adalah DPRK Dapil Pidie Jaya 1.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:44]

Pidie Jaya 1, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:45]

Gimana itu?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:46]

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:47]

Gimana itu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [16:48]

Jadi, ada selisih suara yang menurut perhitungan kami bahwa seharusnya Pemohon atau Partai Amanat Nasional menurut Termohon itu 2.218 suara. Sementara untuk Pemohon seharusnya 2.336 suara atau ada selisih pengurangan 118 suara.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

118.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [17:10]

Sementara untuk Partai Aceh itu ada penambahan, di mana menurut Termohon suara Partai Aceh itu 17.032 suara. Sementara untuk Pemohon ... menurut Pemohon Partai Aceh itu seharusnya mendapatkan 14.588 suara (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:23]

Hanya 14.588.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [17:26]

Atau ada penambahan 2.444 suara, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:31]

Oke. Ini selisih antara berkurangnya Partai Amanat dengan penambahan Aceh kan anu bedanya jauh ini?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [17:39]

Ya, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]

Terus ini sebetulnya suaranya ke mana, selain yang 118 ke Partai Amanat Nasional?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [17:48]

Izin, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:49]

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [17:52]

Bisa diulang, Yang Mulia?

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:55]

Saudara kan hanya mempersoalkan suara 118.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [17:58]

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:59]

Padahal Partai Aceh yang Anda persoalkan penambahannya 2.444.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:05]

Ya. Ini, Yang Mulia, terkait dengan angka pembagiannya, Yang Mulia. Dia dikursi ke ... jadi ini kursi (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:15]

Coba di anu berikutnya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:16]

Kursi ke-4.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:17]

Ini terjadi di beberapa kecamatan dan desa, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:19]

Ya. Ada beberapa Kecamatan Meureudu (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:22]

Sudah diuraikan, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:23]

Di Meureudu, di Kecamatan Ulim. Ya, ada tiga kecamatan itu, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]

Ya. Ini persoalannya kenapa ini kok bisa kayak begitu?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:38]

Itu tidak mempedomani C.Hasil, Yang Mulia, pada saat rekapitulasi di kecamatan. Ini juga sudah kami laporkan di Bawaslu dan (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:45]

Ada keberatannya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:46]

Sudah ada putusan, Yang Mulia, dari Bawaslu memang Termohon melakukan pelanggaran.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:51]

Oke. Itu laporan Saudara sudah ditindaklanjuti Bawaslu?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:55]

Sudah ada putusan, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:57]

Di putusan nomor berapa itu?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [18:58]

Di halaman 32, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:02]

Ya.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [19:03]

Itu sudah ada amar putusan yang kami kutip.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:06]

Oke. Itu Bukti P-1, P-58, ya (...)

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [19:09]

P-150, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:11]

Dan seterusnya, ya. Baik. Terus kemudian suara yang benar.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [19:19]

Suara yang benar.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:19]

Untuk Partai Amanat Nasional berapa jadinya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [19:23]

Se ... jadi suara yang seharusnya untuk Partai Amanat Nasional itu 2.336 suara.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:29]

Sedangkan Partai Aceh hanya 14.588?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [19:33]

Siap, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:34]

Oke, silakan. Kalau begitu terakhir silakan baca Petitemnya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [19:38]

Baik. Petitem berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan Keputusan Komisi ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang, mohon dianggap dibacakan, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.

a. Aceh 2. Untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh.

b. Pidie Jaya 1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk ... menurut Pemohon, kami ulangi. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut. Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional, perolehan suara 24.413 suara. Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara 24.362 suara.

Empat. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di daerah pemilihan Pidie Jaya 1 sebagai berikut. Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional, perolehan suara 2.336 suara. Nomor Urut 21 Partai Aceh, perolehan suara 14.588 suara.

Lima. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang sementara saya tanyakan terlebih dahulu. Surat Kuasa itu yang tanda tangan 22 orang?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [21:27]

Siap, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:28]

Namun terdapat tanda tangan 26 orang. Yang benar Kuasanya berapa orang ini? Ada yang belum tanda tangan, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [21:37]

Ad ... Ada (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:37]

Nanti dilengkapi, ya? Nanti kalau tidak tanda tangan dianggap tidak ada, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [21:42]

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Nanti kalau enggak tanda tangan, minta honor kan enggak boleh, ya (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [21:47]

Siap.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:48]

Kalau enggak ada, ya dicoret saja, ya, meringankan pihaknya.
Kemudian yang kedua, itu tadi pada bagian identitas terdapat 20 orang Kuasa. Namun pada bagian tanda tangan terdapat 22 orang kuasa. Gimana itu? Nanti di anu ya ... check kembali dan tidak ada dalam identitas kuasanya.

Prof. Enny ada yang akan disampaikan?

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:17]

Baik, terima kasih. Kuasa Pemohon, ini kecamatannya ada ... memang ada Kecamatan Meureudu dan ada Kecamatan Meurah 2, ya?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [22:25]

Siap, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:26]

Yang didalilkan, ya?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [22:27]

Ya, Yang Mulia (...)

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:27]

Dua kecamatan yang berbeda itu, ya?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [22:29]

Beda, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:30]

Yang dipakai ini kebuktinya C.Hasilnya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [22:32]

Ya, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:33]

D.Hasilnya enggak, ada?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [22:34]

D.Hasilnya ada kami lampirkan.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:35]

Mesti dibanding ... disandingkan juga?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [22:36]

Sudah, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:38]

Sudah, ya. Nanti tolong dari KPU direspons, ya, mengenai hal ini dari mulai DPT-nya suara sah, suara tidak sah, kemudian perolehannya masing-masing dari C sampai ke D ... apa ... D sampai ke tingkat kabupaten, ya, dan seterusnya itu, nanti tolong di apa ... disikapi. Termasuk dari Bawaslu yang sudah memberikan ... apa namanya ... keputusan di sini, tindak lanjutnya seperti apa? Dan itu tolong direspons dengan maksimal nanti, ya. Termasuk dari Pihak Terkait.

Itu saja, Prof.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:08]

Baik, terima kasih, Prof. Enny.

Yang Mulia, Prof. Anwar? Cukup. Baik.

Ini Petugas, tolong disuruh masuk ada Pihak Terkait Nomor 54, salah kamar ini, enggak tahu masuk kamarnya siapa itu? Terus Bawaslu juga salah kamar. Sukanya kalau di rumah juga suka salah kamar ini.

Pemohon 36 juga, silakan masuk. Ya, lain kali supaya yang presisi, ya. Jangan milih kamar yang lain. Sini kamarnya lebih indah daripada yang sana soalnya, malahan.

Ini saya minta konfirmasi untuk yang persoalan dengan anu ... dengan Partai Aceh, itu yang dipersoalkan di dapil mana ... dapil mana kan? Dapil Aceh 2, ya, sebetulnya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [24:12]

Pidie Jaya 1, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:13]

Pidie Jaya 1 dan A ... Aceh 2?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [24:15]

Aceh 2 untuk P3, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:16]

P3. Sudah, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [24:18]

Sudah, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:19]

Oke.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [24:19]

Cuma ada 2 dari DPR Prov ... DPRA provinsi sama DPRK kabupaten (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:22]

Ya, DPRA dan DPRK, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [24:24]

Siap.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]

Jadi, yang DPRK Pidie Jaya 1, terus DPRA Dapil Aceh 2.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [24:31]

Siap, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:32]

Oke. Saudara mengajukan bukti, ini Buktinya P-1 sampai dengan P-58.7, kemudian P-58.9, P-159?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [24:51]

Siap, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:52]

Tapi, ada beberapa yang belum diserahkan itu, Bukti P-66, P-672, P-681, P-151, ya. Ada di dalam daftar, tapi belum diserahkan, nanti dilengkapi, ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [25:07]

Izin, Yang Mulia. P-66 sampai P-151 sebenarnya, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:11]

P-66 sampai?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [25:12]

Sampai P-151.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14]

P-151?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [25:14]

Siap, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:15]

Nanti, di anu, ya. Kemudian soft copy-nya untuk anu daftar alat bukti tambahan juga belum diserahkan.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [25:22]

Siap, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:23]

Nanti dilengkapi, ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [25:24]

Baik, Yang Mulia.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [25:24]

Ini kita kira-kira selesai jam berapa, ya? Jam ... sekitar jam 12.00 WIB.

Jadi, nanti ada waktu sekitar jam 13.00 WIB maksimal seluruh tambahan alat bukti harus diserahkan untuk Pemohon.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [25:37]

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:38]

Ya. Kalau yang lewat itu, yang sudah selesai persidangan, tapi baru diserahkan jam 13.00 WIB, nanti akan disahkan pada sidang berikutnya.

Tapi yang sudah ada yang sekarang, tambahan sekarang sudah masuk, akan disahkan sekarang setelah diverifikasi.

Ada yang siap bukti tambahan yang bisa diserahkan sekarang? silakan sekarang diserahkan.

Baik, untuk Perkara 58 ... 153 sudah selesai. Sekarang Perkara 36.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [26:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:25]

Sekarang Perkara 36. Ya, Perkara 36, silakan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [26:43]

Izin, Yang Mulia.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:43]

Ya.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [26:44]

Saya ingin menyampaikan Perbaikan Permohonan untuk Perkara 036. Yang terhormat dan yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi. Yang mana dalam kesempatan ini, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok atau Perbaikan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Ya, sebentar, saya potong. Itu dalam Permohonan ada nomornya, tapi tahunnya tidak lengkap, ya.

Nah, kalau begini harus di-typo itu, ya. Tapi sedikit. Dalam Permohonan Saudara tertulis *Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum*, tapi tidak ada tahunnya.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [27:33]

Oh, baik, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:34]

Ya, itu tadi dibacakan, berarti dianggap direnvoi ada *Tahun 2024*.
Ya, sekarang langsung ke berikutnya. Tidak usah dibacakan seluruhnya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [27:44]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan kami, Langen Subha Pangestu dengan ini selaku Kuasa Hukum mewakili Prof. Dr. Yushril Izha Mahendra, S.H., M.Sc., Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, masing-masing dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), bertindak untuk atas PBB untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Aceh, Daerah Pemilihan Simeule I Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Maret 2024 (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:09]

Ya, itu dianggap dibacakan.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:11]

Baik.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:12]

Ya, ini diajukan oleh partai (...)

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:14]

Bulan Bintang.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:14]

Bulan Bintang?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:16]

Baik, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Yang ditandatangani oleh Prof. Yusril dan (...)

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:20]

Afriansyah.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:20]

Ir. Afriansyah, ya?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:21]

Ya.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Baik. Kewenangan, ada kewenangan?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:23]

Kewenangan ada, Yang Mulia. Ada huruf A sampai E dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:29]

Ya, kemudian tenggang waktunya? Saudara ajukan kapan?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:31]

Waktu. Kami mengajukan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.03 WIB, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:37]

Baik.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:38]

Dan masih cukup tenggang waktu.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:39]

Oke, kemudian Kedudukan Hukum?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:41]

Kedudukan Hukum bahwa pada huruf A sampai huruf C, dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon a quo.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:49]

Oke. Yang dipersoalkan?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:52]

Yang dipersoalkan (...)

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:53]

Pokok Permohonannya, perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota di DPRK (...)

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [28:57]

Provinsi Aceh, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Dapil Simeulue?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [29:00]

Ya.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:00]

Satu, ya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [29:01]

Betul, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]

Saudara berkonflik dengan partai apa ini?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [29:08]

Didugai dengan Hanura, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:10]

Hanura. Sekarang Hanura tidak ada Pihak Terkait dari Hanura, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [29:15]

Baik.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:16]

Silakan.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [29:18]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas sebabkan adanya bahwa dugaan adanya pengurangan suara PPB dan mobilisasi pemilih di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue, secara tidak sah menyebabkan selisih suara sebanyak 16 suara antara Partai Hanura dengan Pemohon. Bahwa mobilisasi dimaksud adalah adanya penggunaan kertas suara PPWP, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK bagi peserta pemilih, termasuk penggunaan 5 kertas suara bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus TPK, sementara pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 kertas suara. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur mengeluarkan surat dengan Nomor 007 PM.00.00.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:59]

Ya, intinya itu dianggap dibacakan.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [30:01]

Baik, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:02]

Ada selisih suara 16, ya?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [30:04]

Siap.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:05]

Mestinya suara PPB yang 16 itu masuk ke ... anu, ya, masuk ke Hanura?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [30:11]

Ya, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:12]

Oke. Terus?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [30:15]

Langsung ke Petitum berarti, Yang Mulia?

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Ya, langsung ke Petitum.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [30:00]

Bahwa seluruh rangkaian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengisian anggota DPRK Simeulue Dapil Simeulue I Provinsi Aceh.

Memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Empat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:02]

Baik. Saya minta klarifikasi.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:06]

Baik.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:07]

Ya. Saudara dalam Petitum ini tidak meminta atau menyatakan suara yang benar. Jadi, Mahkamah tidak diminta untuk menentukan suara yang benar. Tapi meminta (...)

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:18]

Betul, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:18]

Tapi meminta PSU, ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:20]

Ya, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:20]

Meminta PSU di TPS (...)

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:23]

002, Suka Karya.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:24]

002 Desa Suka Karya. Karena ada per ... selisih mengenai 16 suara?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:30]

Ya.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:30]

Oke. Baik.
Silakan Prof. Enny, kalau ada.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:35]

Baik. Terima kasih. Saudara Pemohon, ini ada dari surat dari panwaslih, ya?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:43]

Ya.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:43]

Termasuk Komisi Independen Pemilih ... Pemilihan.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:46]

Ya.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:46]

Ada Komisi Independen sendiri di sana, di luar panwaslih, ya? Ini memang ada perintah untuk PSU?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:52]

Awalnya ada perintah PSU, Yang Mulia, sampai dengan (...)

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:54]

Oke. Ada butinya di sini, ya?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:56]

Ada.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:56]

Sudah ada buti, ya?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [31:57]

Ada, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:57]

Kenapa tidak dilaksanakan PSU-nya?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:00]

Itu tidak ada pemberitahuan secara jelas (...)

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:01]

Ya, baik.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:02]

Berikutnya mereka mengeluarkan surat kembali tanpa ... di TPS 02 ini (ucapan tidak terdengar jelas) PSU.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:06]

Ya, tolong nanti KPU kenapa tidak dilakukan PSU di TPS tersebut? Termasuk dari Bawaslu, ya, untuk menjelaskan ini, gitu, ya. Terima kasih.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:17]

Terima kasih, Prof. Prof. Anwar? Cukup.
Baik, ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:23]

Cukup, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]

Jadi permintaan Anda, saya ulang, permintaan untuk PSU di TPS 02, ya?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:29]

Ya.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:30]

Oke, dan itu sebelumnya memang ada (...)

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:34]

Surat dari (...)

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:34]

Surat dari KPU untuk melakukan PSU?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:37]

Dari KIP.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

KIP, ya, oke. Tapi tidak dilakukan?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:34]

Ya.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:40]

Oke, terima kasih. Cukup, ya? Saya sahkan buktinya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LANGEN SUBHA PANGESTU [32:56]

Betul, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:57]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya, sekarang Perkara Nomor 62 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Pihak Terkaitnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada Pihak Terkait? Ada, ya?

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [33:16]

Ada, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]

Oke, terima kasih. Tolong Pihak Terkait untuk ikut mencermati, supaya bisa memberikan ... memberikan respons ... anu ... responsi yang sebaik-baiknya.

Ya, silakan. Pemohon Perkara 62, Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa? Oh, Pemohonnya enggak ada? Perkara Nomor 62-01 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kuasa hukumnya Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Ada enggak? Pak Subani, jangan malu-malu, Pak Subani. Pak Subani. Kalau bisa Anda ... masih ada kosong satu di depan ini?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [34:21]

Izin, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:21]

He eh.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [34:22]

Untuk Perkara 62, perkara dan calegnya untuk minta dicabut.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:26]

Oh.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [34:27]

Ya.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:27]

Ada surat pencabutan?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [34:29]

Menyusul, ya.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:32]

Oh, gimana menyusul? Ha? Itu, PDIP, Pihak Terkait sudah ketawa-ketawa itu.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [34:40]

Karena kita baru dapat infonya juga dari calegnya untuk minta perkaranya untuk dicabut dan dari lawyer daerahnya. Seperti itu, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:47]

Ya, ini jadi tolong kembali ditegaskan. Saya tanya, ya, Pemohon. Pemohon 62, Kuasa Hukumnya siapa ini?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [34:58]

Dr. Subani. Saya, Suluh Jagad.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:01]

Ya, siapa yang ngomong ini di sini?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH SUJAGAD [35:03]

Saya, Suluh Jagad.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:05]

Kalau gitu, Pak Subani saja yang ngomong supaya ini ... di sini yang tertera di sini kan Pak Subani ketuanya. Nah, saya tanya (...)

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:13]

Beritanya juga baru ini tadi.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:16]

Betul dicabut?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:49]

Ya, di sini kita hanya (...)

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:19]

Siapa yang mencabut?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:20]

Di situ, apa (...)

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:21]

Prinsipalnya siapa?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:22]

Di sini hanya dengan melalui WA, jadi Imran Mahfudi pihak Aceh ... dari Aceh. Pe ... apa ... penasihat hukum Aceh, dari lawyer daerah, Pak. Nah, dia dikatakan calegnya minta perkara untuk dicabut, jadi ini (...)

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:38]

Pencabutan sepengetahuan Pak Muhaimin sama Pak Hasanuddin Wahid, enggak?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:41]

Ya, ini kita baru terima ini tadi, Pak. Jadi, baru ini tadi, Majelis. Baru pagi.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:46]

Lha, ya, kalau begini ... ini yang mengajukan yang tanda tangan itu Pak Muhaimin dan sekjen, ya?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:53]

Ya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 62: DR SUBANI [35:55]

Sudah sepengetahuan sekjen dan ... anu ... ketua umumnya enggak?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [35:58]

Berarti belum karena baru di WA ini tadi ... dari penas ... dari PH-nya. Baru jam berapa tadi? Jam 08.00 WIB. Baru jam 08.00 WIB lebih ini tadi.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:08]

Nah, ini yang jadi revolusi harus jalan terus. Enggak jelas begini, ya. Ya, sudah, saya minta ketegasan. Pak Subani, ini kan Kuasa Hukumnya?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [36:21]

Ya.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:22]

Jadi yang tanggung jawab Pak Subani, ya?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [36:00]

Ya, ya, Pak.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]

Tanggung jawab, ya?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [36:27]

Ya.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:27]

Nah, sekarang begini. Nanti dikontak supaya segera surat pencabutannya dikirim nanti jam 13.00 WIB harus sudah masuk.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [36:37]

Ya.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:38]

Tapi secara resmi di dalam persidangan ini dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait tahu persis kalau perkara ini sudah dicabut, ya?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [36:45]

Ya.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Kuasa Hukum, ya.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [36:47]

Ya.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:47]

Nanti kalau ternyata baik partai maupun calegnya mempersoalkan, berarti Pak Subani yang bertanggung jawab, ya.

Baik, kalau begitu terima kasih. Alhamdulillah, sudah dicabut. Nah, itu yang PDIP itu Pihak Terkait harus ... harus bersyukur itu dicabut, itu.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [37:15]

Izin, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:17]

Ya.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [37:18]

Berarti kami tidak memberikan tanggapan, ya, Yang Mulia?

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:21]

Ya, Bu. Tetap mengajukan tanggapan bahwa dalam ... ya, Pihak Termohon juga, Termohon juga harus, ya, memberikan tanggapan kalau perkara ini dicabut, ya, di dalam persidangan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Dr. Subani. Begitu juga Pihak Terkait, tetap direspons, tapi disampaikan kalau itu dicabut, ya.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [37:44]

Siap, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:45]

Supaya (...)

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [37:47]

Majelis Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Ya.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [37:49]

Mungkin kami agak berubah pikiran mungkin kita lanjutkan saja nanti kalau sudah ada resmi pencabutan.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:55]

Lho, lho, gimana ini?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [37:56]

Karena ini (...)

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]

Enggak bisa ini. Enggak bisa bolak-balik. Nanti bolak-balik, gimana?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [38:02]

Ya, ini kami sedang bicara.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:04]

Jadi mempermainkan Hakim, saya suruh keluar saja kalau, gitu. Yang tegas, gitu. Ya.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [38:10]

Makasih, Majelis.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:11]

Pak Subani sering beracara enggak sih?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [38:16]

Ya, sering.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:17]

Nah, ya, enggak boleh kan berubah-ubah, mencla-mencle dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ini kan kacau nanti, ya. Republik kalau orang-orangnya begini kacau semua nanti, ya.

Jadi yang terakhir yang perlu saya tegaskan kembali bahwa Kuasa Hukum Perkara 36[sic!] telah mencabut, jadi Termohon dan Pihak Terkait nanti merespons. Ya, nanti pertanggungjawabannya, ya, nanti Pak Subani yang bertanggung jawab, itu.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [38:45]

62.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

Oh, sori, 62. Perkara 62, sori.

Baik. Sekarang 161. Perkara 161. Perseorangan dari PKB. Siapa yang Kuasa Hukumnya? Pak Subani juga? Dicaput enggak ini? Kalau dicaput juga kan mempercepat proses. Oke, gimana itu? Gimana ini? Ini juga dicaput? Ha? Enggak. Ya, ini, Yang Mulia Prof. Anwar ketawa-ketawa ini, lucu dianggap.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [39:49]

Ya, ya, 161, ya.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Ya, maju ke depan ini, masih ada kosong satu, ini.

Pak Subani biar masuk TV. Jangan malu-malu Pak Subani, biar masuk TV ini di anu ... termasuk teman-teman saya, MK-MK di seluruh dunia juga pada tertarik dengan pileg/pilpres Indonesia ini.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:20]

Ya, ini.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:21]

Perkara 161, ya?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:23]

Ya.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:24]

Oke, silakan dibacakan.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:25]

Ya.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Ini caleg perseorangan, ya?

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:28]

Ya.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:29]

Pihak Terkaitnya enggak ada.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:31]

Ya. Ibu Yanti Anggreyani.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

Yanti Anggreyani?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:33]

Anggreyani. Ya, S.Pd.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:35]

Ya.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:36]

Pemohon memohon supaya ada pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya (...)

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:45]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:44]

Ya, ya. Jadi tidak dibacakan.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:48]

Kewenangannya ada, ya?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:50]

Ya, ada.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:51]

Kewenangan ada. Kemudian ada rekomendasi enggak?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [40:53]

Terus mengenai rekomendasi, ada. Tetapi terpisah tidak dimasukkan di sini, ya, yaitu butir 2 halaman 3 kita sebutkan juga.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:02]

Rekomendasi nomor berapa itu?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:03]

Ya, itu tidak disebutkan memang di sini.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:06]

Tapi Surat Persetujuan DPP Nomor 26395 dan seterusnya itu, ya, bertanggal 21 Maret 2024 (...)

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:09]

Ya. Ya, ada. Ya, ya, ya.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:16]

Oke.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:17]

Terus mengenai (...)

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:19]

Tenggang waktunya?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:20]

Jangka waktunya kita, mengajukannya, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:32]

Oke, masih dalam tenggang waktu?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:33]

Ya, masih dalam tenggang waktu (...)

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:34]

Kedudukan Hukumnya, ada kedudukan hukum?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:37]

Ya.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]

Karena ada rekomendasi juga, ya?

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:41]

Ya dari ... apa ... ketum sama sekjen.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:44]

Oke, terus kemudian dalam Posita yang dipersoalkan perolehan suara ke mana itu? (...)

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:47]

Ya, di halaman 5 di situ.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

DPRK Dapil Aceh Timur 2?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [41:53]

Ya. Sebenarnya hanya di kecamatan itu saja. Kecamatan Peureulak.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:58]

Peureulak, ya?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:00]

Ya, itu. Hanya kecamatan itu saja (...)

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:02]

Itu sebetulnya, Pemohon ini dapat nomor urut berapa sih? Bu Yanti Anggreyani Nomor Urut 3 kalau enggak salah, ya? Ya, kan? Malah cepat saya bacanya.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:17]

Ya, di sini yang dimasalahkan hanya di kecamatan ini, Peureulak saja.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:22]

Peureulak 2.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI

Ya. Jadi si menurut (...)

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:25]

Yanti Anggreyani Nomor Urut 3 ini.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:28]

Oh, ya, Nomor Urut 3. Dia oleh Pemohon, menurut (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:30]

Dia oleh Pemohon, menurut Pemohon 77 (...)

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:33]

77.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:34]

Tapi ditetapkan oleh KPU-nya 75.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:37]

75, jadi ada minus (...)

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:38]

Jadi kurang 2.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:39]

Minus 2.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:40]

Yang dipersoalkan hanya 2 suara.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:42]

Ya, hanya itu saja.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:43]

Oke. Itu terjadi di mana? Di TPS mana?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:46]

Jadi di sini karena banyak sekali ini. Kalau di-breakdown banyak dari ... apa ... Desa-desanya banyak sekali ini.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:53]

Ya. Kalau hanya 2 suara, tapi itu sebetulnya terjadi di berapa TPS, enggak jelas, ya?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [42:59]

Ya, itu ada.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:00]

Sebetulnya, bisa lebih jelas itu kalau hanya 2 suara yang dipersoalkan.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [43:04]

Ada desa, banyak sekali ini, ya, Majelis.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:06]

Ya, ini.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [43:07]

Boleh, mau ditambahkan?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:08]

Izin tambahkan, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:09]

Ya.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:10]

Jadi masalahnya begini, Yang Mulia. Jadi memang ada penambahan yang cukup signifikan, Yang Mulia. Untuk Caleg Nomor Urut 5, Yang Mulia. Di sini kita memang yang kita permasalahan adanya pengelembungan suara, Yang Mulia. Jadi mempengaruhi hasil total di seluruh ... oh, seluruh dapil, maksudnya di dapil caleg yang bersangkutan, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:32]

Tapi untuk bisa masuk, Bu Yanti ini butuh berapa suara sih? 2 kan?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:39]

Jadi masalahnya begini, Yang Mulia. Jadi karena ada pengelembungan yang menurut saya cukup (...)

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

Pengelembungan suara yang (...)

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:48]

616 ini.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:49]

Yang dilakukan oleh anu ... yang diperoleh Nomor 5, Pak Azhari.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [43:54]

Ya Nomor 5, Yang Mulia. Jadi di hasil akhirnya itu kalah, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:59]

Lah, kalau begitu suara yang memang harus ... yang suara benar, yang diperoleh bu anu, berapa jadinya?

411. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [44:09]

Di ... dijumlahlah akhirnya, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:11]

Ya, ya. Mestinya berapa?

413. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [44:13]

1.493.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

1.493?

415. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [44:15]

Betul.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:16]

Pak Azhari, menjadi 1.185?

417. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [44:20]

Ya, betul, Yang Mulia. Di halaman 54, ya?

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:21]

Ya. Oh, jadi itu. Jadi di beberapa TPS, tadi salah satunya yang disebut di awal, itu hanya 2 suara? Tapi di TPS-TPS yang lain banyak juga, ya?

Nah, sekarang yang diputuskan oleh KPU, itu Bu Yanti itu sebetulnya dapat berapa?

419. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [44:47]

Sesuai dengan versi Termohon, Yang Mulia, yang kita cantumkan di (...)

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50]

Ya, versi Termohonnya berapa? Dapat berapa? Ini kan Aceh Timur memperoleh 77?

421. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [44:59]

Ya.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:00]

Menurut Pemohon, tapi menurut Termohon 75. Nah, daerah-daerah yang lain, gimana itu?

423. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [45:07]

Jadi, memang yang kita permasalahan hanya pengelembungan di Kecamatan Peureulak ini aja, Yang Mulia. Cuma kalau seluruh dapil, datanya ada di hasil rekap akhir, Yang Mulia. Jadi yang tercantum kita, yang kita mohonkan untuk ... apa namanya ... yang seharusnya

dicantumkan D.Hasil Kabko itu jumlahnya, sebagaimana halaman 52 itu, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39]

Nah, itu yang jadi persoalan dalam Permohonan ini, itu. Jadi di dalam Posita hanya mempersoalkan yang terjadi di Peureulak?

425. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [45:50]

Ya.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:51]

Di Peureulak itu ada 2 ... 32 desa. Ya, kan?

427. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [45:55]

Ya.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:57]

Hanya ada 42 ... 429 suara. Suara Pemohon sebesar hanya 2.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [46:04]

Ya.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Yang dipersoalkan 2, tapi di sini kemudian jadi 1.492 dan Azhari 1.185, gitu?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [46:06]

Jadi, yang kita permasalahan sebetulnya suaranya Azhari ini, Yang Mulia. Di Kecamatan Peureulak itu, gitu. Memang kalau di kita hanya 2 selisihnya. Cuman karena kami menduga dari Azhari ini, dia ngambilnya dari seluruh nomor urut, Yang Mulia. Random dia di TPS, di

Kecamatan Peureulak. Itu yang kita permasalahan, Yang Mulia. Jadi bukan masalah (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:39]

Kalau begitu kan begini, kalau misalnya yang benar itu. Yang dipersoalkan menurut Termohon, dia hanya dapat 75, Bu Yanti. Tapi menurut Pemohon, itu bisa jadi 104 ... 1.493 itu dari mana?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [47:00]

Dari gabungan seluruh kecamatan, Yang Mulia, di dapil tersebut, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:02]

Kenapa di dalam Positanya enggak diuraikan? Kenapa di dalam (...)

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [47:15]

Ini kami uraikan di halaman 52, Yang Mulia. Ada di tabel di sini.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Nanti, Termohon, bisa ... bisa mengerti enggak Permohonan ini? Ha? Ya, nanti direspons. Ya, direspons. Jadi, di dalam Posita, di dalam Posita Pemohon itu mempersoalkan perolehan suara DPRK di Dapil Aceh Timur 2. Hanya itu, ya. Kemudian banyak uraian, banyak desa, yang banyak TPS yang diuraikan selanjutnya. Tapi kemudian muncul di Petitumnya meminta ditentukan Bu Yanti Anggreyani menjadi 1.493 dan Pak Azhari berkurang, perolehannya hanya menjadi 1.185. Sehingga dari sini, yang memperoleh kursi di DPRK akhirnya Bu Yanti Anggreyani, ya, itu kira-kira, begitu, ya. Nah, ini antara Posita dan Petitum, apakah itu konsisten atau tidak? Nanti, silakan direaksi, gitu, ya.

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [48:33]

Izin, Yang Mulia. Ini (...)

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:34]

Gimana?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [48:35]

Jadi, maksudnya untuk lebih kami simpelkan. Jadinya yang kita permasalahan memang penggelembungan, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Ya. Penggelembungan.

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [48:45]

Pengelembungan, jadi memang (...)

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:46]

Pengelembunga di Azhari, kan?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [48:48]

Betul.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:49]

Ya. Tapi yang dipersoalkan penggelembungan itu, menurut Pemohon di-Positanya hanya di Dapil Aceh Timur 2, gitu kan?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [48:59]

Ya. Hanya di satu Kecamatan Peureulak.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:01]

Ya.

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:02]

Nah, dia ngambilnya ini diduga bukan hanya dari Pemohon, Yang Mulia, tapi dari caleg-caleg lain juga. Itu yang kita permasalahan.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:11]

Oke.

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:12]

Jadi dari caleg-caleg lain dikurangi. Nah, kita memang cuma dua selisihnya, cuman caleg-caleg lain banyak yang berkurang di situ.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:18]

Ya. Ya, sudah kita anukan begitu.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:22]

Jadi, hasil akhirnya persandingan dari C-1 sama di kecamatan itu beda banget, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:28]

Oke. Tapi kenapa yang dipersoalkan itu kok hanya Dapil Aceh Timur 2? Ini terdiri, sekarang saya ... pertanyaan saya, Dapil Aceh Timur 2 itu terdiri dari berapa kecamatan?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:41]

Enam, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:42]

Enam, berapa TPS?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:50]

TPS-nya kita enggak menghitung, Yang Mulia. Dari total (...)

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:52]

Wah, kalau ngajukan Permohonan, ya, sampai di situ, kan?

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:55]

Jadi yang kita masukkan hanya TPS yang bermasalah, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Itu, lha, ya.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [49:59]

Ya.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Jadi, mestinya di dalam Permohonan ini, menurut Pemohon ... menurut Termohon itu sekian ribu, menurut Pemohon memperoleh sekian. Nah, ini ada pengurangan dan penggelembungan atau penambahan di wilayah ini.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [50:20]

Ya.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:21]

Itu.

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [50:22]

Jadi, di lampiran D itu seharusnya sudah tercantum, Yang Mulia, jumlah TPS-nya.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:27]

Ya, nanti kita lihat buktinya, kalau begitu.

Prof. Enny, ada yang dipersoalkan? Cukup, ya? Cukup. Ya, baik. Cukup, ya.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [50:39]

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:40]

Apa tambahannya?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [50:41]

Jadi, begini, Yang Mulia. Jadi, kami itu belum menyampaikan bukti, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:51]

Ini sudah ada Bukti P-1 sampai dengan P-42.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [50:55]

Oh, ya. Cuman fisiknya belum, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:59]

Enggak ini, belum ada fisik?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [51:02]

Ya. Maksud saya baru daftar buktinya.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:04]

Baru daftar bukti.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [51:05]

Yes, betul.

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [51:07]

Tapi sekarang buktinya itu ada sekarang.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:09]

Oh, ya. Buktinya mestinya, tadi sudah di awal saya sampaikan. Bukti pada waktu mengajukan Permohonan, bukti itu sudah harus ada meskipun jumlahnya masih kurang.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [51:24]

Ya.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:25]

Bukan hanya daftar alat bukti.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [51:29]

Ya. Jadi (...)

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:30]

Lha, sekarang kalau sidang sudah selesai semua, terus kemudian baru mengajukan alat bukti, enggak ada gunanya, kan?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [51:35]

Jadi gini, Yang Mulia. Jadi, memang kemarin juga kami sudah ke sini, sudah ke PTSP untuk menyampaikan bukti. Memang dari yang PTSP menyampaikan juga nanti saja pas saat persidangan, begitu infonya.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:46]

Enggak. Anda kan juga harus baca ... anu ... kan, PMK kita, kan?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [51:50]

Baik.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:51]

Coba ini saya ... anu ... ya, saya bacakan.

Ya, alat bukti, surat persetujuan dari partai dan surat kuasa. Pertanyaannya, apakah alat bukti itu, ya, merupakan syarat formil dan diperbolehkan ditambah sampai dengan sidang terakhir? Jika alat bukti pemohon juga tidak disampaikan dalam sidang pertama, maka nanti akan menjadi penilaian hakim. Nah, sekarang silakan ditambahkan, tapi akan dinilai oleh Hakim.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [52:34]

Siap, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:36]

Ya. Mestinya secara formil, alat bukti itu sudah masuk pada waktu (...)

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [52:43]

Sudah ada sebagian yang masuk sebenarnya.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]

Lho. Tapi ini di sini, catatan kami hanya daftar bukti.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [52:54]

P-1 (...)

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:54]

Jadi P-1 sampai P-42 ada daftar buktinya ada toh. Daftar buktinya ada. Tapi alat buktinya itu tidak ada. Tapi silakan lah nanti disampaikan, ya. Disampaikan nanti akan dinilai, apakah itu terlambat atau tidak, memenuhi syarat formil atau tidak, ya.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [53:16]

Makasih, Yang Mulia.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:17]

Dan begini, Yang Mulia, sedikit lagi, Yang Mulia. Jadi dari bukti kita itu kan yang kemarin, daftar bukti yang masuk itu hanya sampai P-42, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:33]

Ya, gimana? Silakan.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:34]

Dan kami juga sekaligus mau melakukan penambahan, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:37]

Oh, ya. Kalau mau nambah sih boleh-boleh saja. Tapi yang pertama itu, hanya daftar bukti, DAB. Belum alat buktinya. Baru daftar alat bukti. Tapi silakan dimasukkan. Saudara menganggap itu tambahan atau itu bukti baru, nanti anu ... Mahkamah yang akan menilai.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [54:02]

Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]

Ya, nanti dipertimbangkan. Jadi Saudara baru menyerahkan ini kan?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [54:17]

Ya, daftar bukti.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [54:18]

Ya, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:19]

Nah, ya, ini daftar bukti atau alat bukti?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [54:21]

Daftar bukti.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [54:22]

Daftar bukti.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]

Lah, ya, sini dokumennya ada. Dan kita teliti sekali kita sudah melakukan kayak begini, apalagi pilkada lebih rumit, ya, Termohon, ya. Ini ... nih ... nih dijelaskan. Ini tulisannya. "Perkenalkanlah menyampaikan alat bukti dengan daftar sebagai berikut." Nah ini daftarnya, ini enggak ada lampirannya. Kalau ada alat bukti berarti ada lampirannya.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [54:49]

Ya.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:49]

Oh, P-1 berupa apa, P-2 berupa apa, P-3 partai yang ikut pemilu, gitu kan.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [54:57]

Sekarang ada ini, sekarang.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:58]

Lho, kok, ya, sekarang, ya. Nanti diserahkan besok-besok kalau sudah selesai sidang, ya, enggak apa-apa, boleh, Mahkamah, kita terima kok itu, ya. Jadi jangan dipersoalkan lagi untuk semuanya teman-teman. Ini lho, bukti fisiknya hanya ini, di dalam persidangan saya tunjukkan, ya. Ini daftar alat bukti, bukan alat bukti, ya. Tapi nanti kalau silakan mau ditanyakan.

Siapa yang anu ... handphone tolong! Sudah saya sampaikan, ya, enggak boleh. Ya, sudah keluar enggak boleh masuk lagi itu! Sudah ada aturannya kok.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [55:42]

Izin, Yang Mulia. Jadi intinya tetap kami masukkan (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:45]

Ya, silakan.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [55:46]

Nanti tinggal tunggu pertimbangan (...)

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:47]

Silakan. Nanti kita pertimbangkan, ya. Jadi kita belum bisa. Sekarang mau yang mau disahkan apa? Enggak ada kan?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [55:56]

Sebetulnya nih kalau teknisnya kita bisa langsung bawa.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:58]

Lho, ya, enggak bisa kan? Di bawa ke sini belum diverifikasi.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [56:02]

Betul.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:04]

Ya, makanya sekarang nanti boleh dimasukkan.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [56:05]

Ya.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:06]

Nanti diverifikasi tapi nanti dinilai oleh Hakim dipertimbangkan menjadi bukti betul atau al ... alat buktinya enggak ada, gitu, ya.

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [56:17]

Mohon dianggap ada, Yang Mulia.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:18]

Oh, ya, nanti gimana, ya, kalau begitu.
Prof. Enny, ada?

519. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:25]

Tolong nanti ke KPU, ya, untuk dibuat sandingan, dari C Plano, C.Hasil, sama D itu, ya, untuk dilihat khusus di Peureulak itu. Peureulak ada ... ada Peureulak Barat, Timur, ada berapa Peureulak itu? Yang dipersoalkan hanya Peureulak aja, ya? Ini beda dengan, Peureulak itu ada ... satu kecamatan, yang disebut Peureulak itu ada berapa sih sebenarnya? Beberapa kecamatan saya lihat di sini? Ada Peureulak, ya, di sini ada Peureulak Timur, Barat, kemudian Rantau Peureulak, itu beda-beda kecamatan, ya?

520. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [56:58]

Beda kecamatan.

521. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:00]

Oh, beda kecamatan, Peureulak sendiri?

522. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [57:02]

Ya, nanti kami cek, Yang Mulia.

523. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:04]

Ya, cek ya semuanya, ya.

524. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [57:05]

Baik, Yang Mulia.

525. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:06]

Tolong, ya, untuk Peureulak itu. Terima kasih.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:09]

Prof. Anwar, ada? Cukup, ya.

Ini tambahan lagi untuk Perkara 161, Kuasa Hukum atas nama Muhammad Zainuddin, belum tanda tangan, belum menyampaikan kartu anggota advokat. Nanti kalau anu dilengkapi sekalian, ya. Baik, kita sudah selesai Perkara 161.

Berikutnya ... Perkara 175, perseorangan, PKB. Ini ada Pihak Terkait Muhammad Rizal, ada yang mewakili anu Kuasa Hukumnya Muhammad Rizal? Enggak ada?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [59:11]

Ada, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Enggak, Pihak Terkaitnya mana? Kalau Perkara 175, dari Hasbi Ahmad, perseorangan dari PKB, kemudian Pihak Terkait mengajukan Permohonan Muhammad Rizal? Enggak ada Muhammad Rizalnya? Apa enggak tahu dia kalau harus hadir?

Baik. Silakan, sampaikan.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [58:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kami wakili atas nama Bapak Hasbi Ahmad, sebagai Pemohon mempermasalahkan itu Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya. Pemohon Bapak Habib Ahmad ... Hasbi Ahmad, mengenai kedudukan hukum Pemohon. Pemohon juga telah memperoleh izin secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai, namun di sini juga secara eksplisit tidak disebutkan.

Kemudian masalah tenggang waktu juga, tenggang waktunya kami mengajukan pada tanggal 23 Maret.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:36]

Ini objeknya kurang, ya? Kurang 360, tentang ... 360, kurang tahun 2024, ya?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [59:45]

Oh, ya ... ya, mohon maaf.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Direnvoy, ya, 2024.

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [59:48]

Ya, mohon maaf.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:50]

Oke.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [59:51]

Kami mengajukan permohonan tanggal.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:53]

Rekomendasi ada, ya?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [59:54]

Ada.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:54]

Oke.

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [59:56]

Tanggal 23 Maret 2024.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:56]

Kalau begitu Mahkamah wewenang, ya?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:00]

22.00 WIB.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT: DR SUBANI [01:00:01]

Oke, masih dalam tenggang waktu.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:04]

Ya.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Terus Kedudukan Hukum? Perseorangan, ada rekomendasi?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:08]

Ya, ada, ada rekomendasi.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:10]

Oleh karena itu mempunyai kedudukan hukum?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:11]

Ya.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:12]

Kemudian Positanya? Yang dipersoalkan adalah perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRK Dapil Aceh Utara 5?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:22]

Ya.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:23]

Betul?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:23]

Ya. Yang dipermasalahkan, itu.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:25]

Oke. Gimana ini? Persoalannya apa?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:28]

Di situ (...)

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:31]

Yang pertama, di Kecamatan Lapang?

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:34]

Ya. Hanya satu kecamatan juga, ya.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:37]

Kecamatan Lapang saja, ya?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:38]

Ya, ya.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:39]

Baik. Itu Pak Hasbi perolehan suaranya menurut Pemohon 15 ... 184?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:47]

Ya, diakhir.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:48]

Sedangkan yang ditetapkan Pemohon=54?

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:52]

Ya.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:52]

Ini (...)

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:53]

Ya, 15 ... 1.554, ya, betul.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:56]

Berhadapan dengan Muhammad Rizal?

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:00:59]

Ya.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:00]

Muhammad Rizal itu yang Nomor Urut 4 itu, ya?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:01:01]

Nomor 4, ya, ya.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:03]

Muhammad Rizal yang ditetapkan oleh Termohon=1.500.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:01:08]

Ya.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:09]

Menurut Pemohon hanya 1.307?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:01:13]

Ya, ya.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:13]

Jadi ada selisih 193?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:01:16]

Ya.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:17]

Oke, terus?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:01:017]

Ya.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Gimana?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:01:20]

Bahwa menurut Pemohon ... langsung saja. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suaranya atau disebabkan oleh penambahan suara calon anggota di DPR Kabupaten Aceh Utara, ya.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:32]

Ya.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:01:33]

Di situ kalau saya rinci per-kecamatan, panjang, Habib Ahmad itu selisihnya ada minus 8, ya. Terus nanti di Kecamatan Lapang, di situ minus 13. Terus minus 0 ... minus 05, ya. Mungkin tidak saya bacakan semua, ya.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:57]

Perolehan suara di plano.

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:01]

Ya, terus di Kecamatan Lapang lagi ada minus 8 lagi. Ada banyak ini, jadi mungkin tidak ... ya.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:07]

Kemudian, Desa Kuala Keureuto segala itu?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:09]

Ya, ada.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:11]

Desa Cangkoi?

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:12]

Ya, banyak sekali. Nanti kalau saya bacakan semua ... mungkin saja.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:17]

Oke.

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:18]

Langsung ke Petitem.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:20]

Oke. Kemudian di dalam Petitem?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:23]

Petitumnya saja, kami pertama mohon Majelis Yang Mulia mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ya. Terus membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Terus menetapkan hasil perolehan suara yang ... yang benar menurut Pemohon.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:43]

Dibaca itu?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:43]

Ya.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Seluruhnya itu?

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:45]

Di sini untuk (...)

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:47]

Dapil Aceh Utara 5.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:02:48]

Ya, Habib Hasbi Ahmad 2.027. Kalau jumlah totalnya 4.462. Mungkin itu saja.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:03]

Terus Muhammad Rizal berkurang jadi 1.765?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:03:06]

Ya.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:07]

Jadi, urutan ... urutan pertama, Haji Hasbi Ahmad, ini?

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:03:12]

Ya. Ini ada mau ditambahkan lagi.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:13]

Oke.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:13]

Jadi saya tambahkan, Yang Mulia, izin. Jadi ini bahkan sudah ada putusan dari panwaslih, Yang Mulia. Bawasannya memang ada pelanggaran administratif di Kecamatan Lapang.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:24]

Ya.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:24]

Atas penggelembungan suara yang kita maksud, begitu, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:27]

Penggelembungan suara diperoleh Muhammad Rizal?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:29]

Ya. Ini sudah ada putusannya, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:32]

Ya. Nanti anu ... ya.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:34]

Baik.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:35]

Pantarlih atau dari Bawaslu Aceh nanti, ya. Termohon juga nanti merespons.

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:43]

Ya, dan kemudian juga (...)

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:44]

Pihak Terkaitnya Pak Muhammad Rizalnya, enggak ada. Enggak hadir ini.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:48]

Ya.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:49]

Ya. Kalau gitu Termohon dan Bawaslu saja yang merespons, ya. Suara yang benar jumlahnya 4.462 ini.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:03:58]

Ya. Sesuai dari Petitem kita, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:59]

Oke.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:04:00]

Dan ini juga sama kayak yang Perkara 161 tadi, Yang Mulia. Jadinya kami baru hanya menyampaikan daftar alat buktinya, Yang

Mulia. Jadi, mohon izin untuk hari ini kami masukkan dan mohon untuk dipertimbangkan, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:22]

Ya.

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:04:23]

Mudah-mudahan dipertimbangkan, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:26]

Enak pakai kata *mudah-mudahan* atau *semoga*, ya?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:04:30]

Semoga, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:31]

Nah, enak itu banyak ... terserah.

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:04:33]

Amin, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:35]

Jadi ini memang ini, kita enggak bisa mengalah ... mengesahkan alat bukti karena alat buktinya enggak ada.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:04:41]

Baik, Yang Mulia.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:42]

Ya.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:04:42]

Sebelum jam 13.00 WIB mungkin sudah.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:44]

Oke, ya, coba nanti anu. Ini Surat Kuasa juga ini. Surat Kuasa atas nama Niko Krishna Arya belum menandatangani ini.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:04:57]

Baik, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]

Ya, terus surat rekomendasi dari DPP belum diserahkan, tapi sudah ditulis.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:05:04]

Ya.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:05]

Pihak Terkait, ya. Tapi ... oh, Pihak Terkaitnya. Oke. Jadi bukti belum bisa diserahkan. Coba nanti ditambahkan atau diserahkan bagaimana. Kalau nanti dianu, kita akan serah ... apa namanya ... akan kita sahkan pada waktu sidang berikutnya.

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:05:23]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:24]

Ya, cukup, ya. Pak Subani itu sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Ha? Kalau di sini, belum?

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:05:39]

Belum, tapi kalau di berbagai pengadilan sudah 36 tahun.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:43]

Oh, ya, agak ... agak lain di sini memang.

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:05:46]

Tapi praktik sudah 36 tahun.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:48]

Oh ya, praktik, oh ya, Pak Doktor kok. Ya, kalau praktik di pengadilan biasa sudah, tapi memang agak beda.

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:05:56]

Ya.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Antara peradilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah itu dengan di sini.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:06:03]

Tapi kalau yang lain sudah semua.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:05]

Oh, ya, di surga saja sudah pernah mungkin membela yang di surga atau di neraka.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:06:11]

Jadi saksi alih juga pernah.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:12]

Ya, makanya itu. Belum akhirat, pengadilan akhirat. Baik, terima kasih Pak Subani dan kawan-kawan.

Sekarang Perkara 39. Perseorangan Nanda Nurkhalis, perseorangan PKB. Masih sama ini? Pemohonnya? Ini dari Partai Demokrat? Pemohon enggak hadir? Ya, terima kasih. Enggak, duduk di depan saja, enggak apa-apa kok, pindah, malu kalau disorot. Oh, ya, silakan. Enggak bisa diwakilkan kalau itu memang. Ini Pak Nanda enggak hadir ini? Demokrat? Perseorangan? Enggak hadir? Ini kalau enggak hadir berarti tidak serius. Ya, tolong Petugas dipanggil, ada enggak Pak Nanda perseorangan? Segera dipanggil, kalau enggak ada dilaporkan di persidangan, supaya kita bisa menentukan tidak serius. Enggak ada? Oke, terima kasih, ya.

Jadi di dalam persidangan, Saudara Nanda sudah berkali-kali dipanggil secara sah dan tidak hadir, maka nanti Mahkamah akan menilai bagaimana Permohonan ini.

Oke, berikutnya Perkara 54 dari Partai Nasdem. Silakan, Pak.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:08:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan ... tidak semua, kami bacakan. Yang lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:21]

Ya.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:08:23]

Oke. Kami mulai. Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU, anggota DPR, dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU di Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB ... eh, maaf, pukul 15.08 WIB.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:59]

Ya.

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:09:00]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:09]

Ya.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:09:10]

Pokok Permohonan.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:11]

Kedudukan Hukumnya ada, ya?

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:09:13]

Ada, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:14]

Ya. Pokok Permohonannya? Ini yang dipersengketakan adalah dengan partai (...)

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:09:24]

Aceh (...)

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:24]

Aceh, ya. Dengan Partai Aceh. Di sini Pihak Terkaitnya ada enggak? Dicek dulu, tidak ada ... Partai Aceh ada, ya?

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD [01:09:36]

Hadir.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:37]

Oke, supaya dicermati Permohonan ini. Baik (...)

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:09:41]

Oke.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:42]

Anda mempersoalkan gimana ini?

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:09:47]

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai Aceh yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:01]

Ya.

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:02]

Partai Nasdem memperoleh 2.065, menurut Termohon. Partai Aceh memperoleh 14.944, menurut Termohon. Menurut Pemohon, Partai Aceh hanya mendapat 13.828. Jadi, selisinya sekitar 1.116.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:22]

Oke.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:24]

Bahwa perolehan suara Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Bandar Baru.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:33]

Itu lokasinya di mana saja? Dapilnya di mana saja itu? 1.116 itu?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:40]

Jadi Dapil 3 Pidie ini, Yang Mulia. Itu terdiri satu kecamatan, hanya satu kecamatan.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:46]

Satu kecamatan?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:47]

Ya.

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:48]

Diulang, kecamatan mana?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:49]

Kecamatan Bandar Baru.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:51]

Kecamatan Bandar Baru, berapa TPS di situ?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:10:55]

111 TPS, Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:56]

111 TPS, oke.
Terus suaranya 1.116, ya?

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:11:04]

Bukan, Yang Mulia. Partai Aceh ... Partai Aceh itu di ... di D pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, jumlahnya mereka meraih 14.944.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:22]

Itu menurut Termohon?

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:11:23]

Ya. Padahal pada saat di kecamatan, berdasarkan TPS, menurut Termohon itu hanya 13.828 (...)

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:31]

13.828, terus? Ada selisih suara 1.116 (...)

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:11:38]

1.116, ya.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:42]

Berarti yang dipersoalkan di Kecamatan Bandar Baru, 11 TPS itu 1.116, kan berarti?

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:11:48]

Betul, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:49]

Oke. Oke, itu karena apa? Karena kekeliruan apa di mana? Di TPS-nya atau di rekapitulasinya?

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:11:59]

Di waktu Rekapitulasi di (...)

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:01]

Rekapitulasi tingkat kecamatan?

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:02]

Kecamatan. PPK tidak memperlihatkan C-1 Hasil atau C-1 Planonya.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Ok.

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:12]

Jadi dari laptop langsung ke layar, sehingga para saksi tidak ... tidak mengetahui, tidak bisa membandingkan dengan C-1 (...)

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:20]

Ok.

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:21]

Hasil salinan ... hasil yang mereka pegang masing-masing.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:23]

Nah persoalan itu, dilaporkan ke Bawaslu, enggak?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:25]

Sudah dilaporkan ke Bawaslu (...)

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:27]

Ya.

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:28]

Dan Bawaslu telah memeriksa dan memutuskan perkara laporan tersebut.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]

Untuk dilakukan rekapitulasi ulang?

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:36]

Betul, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:37]

Oke.

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:38]

Akan tetapi.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:40]

Tidak dilakukan?

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:12:41]

Tidak dilakukan. Karena KIP atau KPU Kabupaten Pidie Jaya, mengajukan upaya ban ... upaya hukum meminta koreksi ke Bawaslu RI. Itu tadi yang kami samp ... mohonkan ke mahkam ... ke Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:59]

Oke.

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:13:00]

Bukti itu, putusan Bawaslu, itu belum (...)

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:02]

Yang terlambat itu?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:13:03]

Ya. Di putusan Bawaslu, Pemohon upaya hukum itu adalah KIP. Mereka mengatakan bahwa kami tidak ... tidak bisa dipersalahkan di situ, karena itu apa ... rekapitulasi tingkat kecamatan. Akhirnya, Bawaslu mengkoreksi bahwa Termohon 2 dalam hal ini KIP, dinyatakan di situ tidak ... tidak ... tidak diminta pertanggungjawaban. Tapi putusan yang lain tetap, harus dilakukan apa (...)

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:32]

Ok. Jadi persoalan ini kenapa diajukan ke Mahkamah?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:13:35]

Betul, Yang Mulia.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:37]

Nanti Bawaslu Aceh, ya, tolong direspons. Jadi, sudah ada diminta untuk rekapitulasi ulang, tapi tidak dilakukan. KPU nanti juga, ya, merespons. Ya.

Sekarang Petitumnya tolong dibaca kalau begitu.

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:13:56]

Oke. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2044 ... 2024 tentang dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia, sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 Provinsi Aceh untuk pengisian calon anggota DPRK.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh sebagai berikut. Perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3. Nomor Urut Partai 5, Partai Nasdem, perolehan suara 2.065. Nomor Urut 21, Partai Aceh, perolehan suara 13.828.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
 - 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C.Hasil TPS.

4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:46]

Baik. Itu minta rekapitulasi ulang, berarti, ya?

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:14:48]

Betul, Yang Mulia.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:49]

Oke. Nanti anu ... Prof. Enny ada? Cukup. Prof. Anwar? Cukup, ya.

Baik. Sudah jelas, nanti KPU dan Bawaslu untuk merespons ini, bagaimana respons dari Bawaslu dan KPU.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-119. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kalau Permohonannya jelas begini kan enak cepat, toh. Tadi Pak Subani ini agak kacau balau, sampai akhirnya mau ke toilet.

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:16:38]

Yang Mulia.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:37]

Ya.

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:16:38]

Apakah tambahan bukti yang tadi di hari ini (...)

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:41]

Boleh disampaikan.

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:16:42]

Hari ini disampaikan

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:44]

Terakhir nanti, ya, kita lihat, ya.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:16:45]

Oke.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:45]

Mungkin pukul 13:00 WIB sudah harus masuk, ya.

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:16:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:49]

Nanti akan kita ... tambahannya akan kita sahkan pada persidangan berikutnya.

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:16:53]

Siap.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:53]

Oke. Sekarang Perkara 168. Perkara 168 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:17:13]

Siap

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:13]

Oke. Silakan, dibacakan. Duduk depan boleh, silakan. Supaya tersorot kamera dengan baik. Silakan.

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:17:42]

Baik, izin, Yang Mulia.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:43]

Ya.

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:17:44]

Kami dari Kuasa Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, hadir di sini saya sendiri Bakas Manyata (...)

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:51]

Ya.

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:17:52]

Dan rekan saya Dega Kautsar.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:55]

Ya. Silakan.

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:17:57]

Assalamualaikum wr. wb.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:59]

Walaikumsalam.

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:17:59]

Salam sejahtera untuk kita semua. Izin, saya bacakan sedikit Permohonan, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Ya.

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:10]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:23]

Dan seterusnya.

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:24]

Izin, Yang Mulia, ini di tanggal 26 ketika menyampaikan perbaikan, ada kesalahan pengetikan. Seharusnya keputusan KPU dibacakan itu di tanggal 20, sudah benar. Seharusnya hari Rabu, tetapi kami menulis hari Kamis dan sudah kami renvoi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:44]

Ya, kalau ini sih bisa direnvoi, kecil ini.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:49]

Siap.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:50]

Karena tanggal 20 kan sudah tertulis, kan?

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:52]

Tanggalnya sudah benar, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:53]

Pukul 22.19 WIB kan?

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:54]

Betul.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:55]

Ya, yang dimaksud itu berarti hari Rabu?

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:57]

Ya.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:58]

Oke.

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:18:58]

Dan sudah kami renvoi, Yang Mulia.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:00]

Ya. Kalau direnvoi sekarang masih boleh ini.

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:04]

Siap.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:05]

Ya.

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:05]

Untuk identitas kuasa, kami anggap (...)

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:08]

Dibacakan.

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:09]

Sudah dibacakan.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:08]

Ya.

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:11]

Kami dari Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan, lalu tentang (...)

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:23]

Kewenangan, punya kewenangan?

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:25]

Kewenangan, sudah, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:26]

Ya.

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:27]

Partai Peserta Pemilu Nomor 17. Lalu untuk (...)

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:31]

Tenggang waktu?

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:32]

Tenggang Waktu, kami menyerahkan di hari Sabtu, tanggal 23 Maret (...)

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:37]

Pukul 19.51 (...)

759. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:38]

Pukul 19.51 WIB.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]

Oke, Kedudukan Hukum ada?

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:43]

Kedudukan hukum ada, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:46]

Kedudukan hukum, ya. Yang dipersoalkan, pokok Positanya gimana?

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:19:53]

Siap, jadi kita mempermasalahkan untuk konversi PT, Yang Mulia, parliamentary threshold di Dapil 2 ... Dapil Aceh 2 anggota DPR RI untuk suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi, di sini, Yang Mulia, ada migrasi suara yang kami duga antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Garuda. Jadi di sini perolehan Partai Persatuan Pembangunan menurut Keputusan KPU 360 Tahun 2004 ... 2024, suara P3, yaitu 5.878.777 atau setara dengan 3,87%. Artinya, berdasarkan keputusan tersebut Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parliamentary threshold, sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan 6 ... 0,13%.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:08]

Itu kan secara nasional.

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:09]

Siap.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:10]

Jadi, yang dipersoalkan kan di Aceh.

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:11]

Oke.

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:13]

Jadi, di Dapil Aceh (...)

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]

Yang di Aceh saja, itu kalau itu urusannya nanti, urusan KPU kalau (...)

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:17]

Siap.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:18]

Nasionalnya gimana. Yang dipersoalkan di Aceh saja.

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:23]

Jadi, untuk di Aceh, Yang Mulia, persandingan perolehan Partai Persatuan Pembangunan versi Termohon. Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 92.914 suara.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:36]

Ya.

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:37]

Sedangkan (...)

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:38]

Menurut Pemohon berapa?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:39]

Pemohon 98.214 suara.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:44]

Oke.

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:45]

Artinya, ada selisih 5.340 suara.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:50]

Ya. Terus yang dipersoalkan suara itu gimana (...)

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:21:53]

Nah, yang dipersoalkan, Yang Mulia, bahwa diduga Partai Persatuan Pembangunan itu kekurangan 5.300 suara.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:03]

Bukan kekurangan, kalau kekurangan (...)

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:05]

Diambil 5.300 suara, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:06]

Diambil oleh partai apa?

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:07]

Oleh Partai Garuda.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:08]

Garuda. Ya, Partai Garuda sejumlah berapa? Mestinya (...)

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:16]

Harusnya Partai Garuda 40 suara, Yang Mulia.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

40 suara.

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:19]

Hanya 40 suara.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:20]

Tapi ditetapkan oleh KPU?

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:22]

KPU, 5.340 suara.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:23]

Oke. Jadi, mestinya ada 5.300 suara yang miliknya (...)

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:30]

P3.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:31]

P3. Oke, jelas itu gitu, ya. Oleh karena itu, dengan begitu, perolehan suara yang benar (...)

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:41]

Perolehan suara benar ... yang benar P3 di Dapil Aceh 2, yaitu 98.214 suara.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:50]

Partai Garuda jadi berapa?

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:52]

Partai Garuda menjadi 40.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:54]

40. Coba sekarang bacakan Petitumnya.

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:22:57]

Siap. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

Ya.

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:24:15]

Sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Aceh 2, Provinsi Aceh. Konversi PT 4%.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Aceh 2, Provinsi Aceh sebagai berikut. Satu, Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara yang benar 98.214 suara. Partai Garuda=40 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
atau apabila Mahkamah Konstitusi berpen ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:23]

Terima kasih. Ini ada yang akan disampaikan oleh Prof. Enny. Suara sebanyak itu, 5.300 itu, di mana saja persoalannya?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:24:35]

Siap, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:36]

Silakan Prof. Enny (...)

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:24:36]

Ini (...)

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:38]

Sebentar, Prof. Enny. Silakan. Jangan kesusu dijawab.

806. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:41]

Ya, Mas.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:41]

Yang mau nanyakan Prof. Enny nih.

808. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:44]

Ini persoalannya di Dapil Aceh 2, ya.

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:24:47]

Siap.

810. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:48]

Ada berapa kecamatan di situ?

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:24:51]

Kalau total kecamatannya, biar rekan saya.

812. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:55]

Enggak hafal?

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:24:56]

Izin, Yang Mulia, saya bantu jawab. Bahwa kita permasalahan 5.300 suara itu ada di tujuh kabupaten.

814. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:04]

Oh, tujuh kabupaten. Da ... dalam Dapil Aceh 2, itu?

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:07]

Dalam Dapil Aceh 2.

816. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:08]

Dari dalam (...)

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:08]

Terus (...)

818. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:08]

Sebentar. Dalam Dapil Aceh 2 itu ada tujuh (...)

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:11]

Kabupaten.

820. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:13]

Aceh 2 itu ada tujuh kabupaten, ya?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:14]

Ya.

822. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:15]

Tujuh kabupaten. Ini kenapa enggak diuraikan di sini kabupatennya?

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:20]

Untuk menguraikan ini permasalahan teknis, Yang Mulia. Karena kita ada di (...)

824. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:26]

Ya, ini juga persoalan teknis (...)

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:26]

1.000 ... 1.000 TPS.

826. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:27]

Jadi, ini ada berapa (...)

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:28]

Kurang lebih (...)

828. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:28]

Jadi di tujuh kabupaten itu ada berapa TPS?

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:29]

1.800 (...)

830. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:30]

1.800 (...)

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:33]

1.082.

832. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:35]

1.082 TPS?

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:37]

Kurang lebih seperti itu.

834. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:38]

1.082 TPS. He eh. Ini Harusnya di 5.300 itu ada di TPS mana saja?

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA H[01:25:47]

Ya. Jadi nanti kita uraikan yang sudah masuk itu ada di daftar alat bukti rinciannya. Dan kemudian (...)

836. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:53]

Ada, di situ semua. Pakai apa buktinya?

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:24:54]

Nanti kita sampaikan pada kesimpulan, Yang Mulia.

838. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:55]

Pakai apa buktinya?

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:57]

Pakai C.Hasil, Yang Mulia.

840. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:58]

Sekarang belum ada buktinya?

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:59]

Sekarang yang sudah kami input tadi sudah diterima oleh Kepaniteraan.

842. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:04]

Pada waktu diajukan belum ada bukti, ya?

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:26:06]

Ada P-1 dan P-2. Pada saat awal untuk memenuhi syarat formil kan memang harus ada bukti.

844. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:11]

Ada Bukti P-1 dan P-2?

845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:26:12]

Ada bukti. Kemudian hari ini kita tambahkan sebagai bukti tambahan sementara.

846. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:15]

Untuk menunjukkan di mana saja 5.300 itu (...)

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:26:17]

Ya, betul, Yang Mulia.

848. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:18]

Diambilnya.

849. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:25:18]

Semua terdaftar di daftar alat bukti kita.

850. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:21]

Ya, baik. Tolong nanti, ya, KPU, ya, direspons, ya, soal ini yang 1.082 TPS itu, ya. Itu saja, Pak.

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:26:31]

Terima kasih.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:31]

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup.
Ya, jadi ... yang jadi masalah adalah Anda mempersoalkan suara 5.000 berapa itu?

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:26:45]

5.300.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:45]

5.300 itu suara yang ada di tujuh kabupaten.

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:26:49]

Siap

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:50]

1.082 TPS.

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:26:53]

Ya.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:54]

Tapi tersebar dimana belum ada?

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:26:57]

Ada di daftar alat bukti.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:58]

Nanti dibukti.

861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:26:59]

Siap.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:59]

Kalau daftar alat bukti enggak bilang. Yang mem ... menyatakan itu tuh di alat buktinya.

863. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:27:06]

Oh, ya, ada di rincian buktinya, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:08]

Alat buktinya, bukan di daftar.

865. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:09]

Ya.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:10]

Kalau daftarnya enggak menunjukkan angka-angka di alat buktinya, ya. Tapi sementara Sudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-13. Sudah ada belum itu di situ?

867. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:21]

Sudah ada, Yang Mulia.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:22]

Ada di sini?

869. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:24]

Ada.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:24]

Oke. Mau nambahkan alat bukti, enggak?

871. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:27]

Nambahkan, Yang Mulia.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:28]

Nambahkan. Oke.

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:27]

Tetapi masih dalam daftar ... masih sesuai dengan dalam daftar alat bukti yang sudah kita serahkan.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:34]

Oke. Jadi kita sahkan dulu P-1 sampai dengan P-13.

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:40]

Siap.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:41]

Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, Supaya jelas. Sudara sudah mendalilkan itu, tapi buktinya yang tidak ada sementara itu. Atau sudah ada?

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:52]

Bukti sudah ada.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:53]

Nanti kita lihat.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:54]

Ya.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:53]

Nanti Termohon, nanti bisa dicek, ya.

881. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:00]

Izin, Yang Mulia.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:01]

Ya.

883. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:28:02]

Dari bukti tambahan itu, kita kan dari P-1 sampai P-1.082, kita sudah serahkan tadi, itu dari P-1 sampai P-13. Sisanya P-14 sampai P-1.082, mohon izin, karena agak banyak, jadi beri waktu sampai maksimal sidang berikutnya, Yang Mulia.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:23]

Wo, yo, enggak bisa, nanti dia enggak bisa ngereaksi, enggak bisa merespons. Sudah ada aturan, permohonan dan bukti itu supaya bisa direspons.

Nah, sekarang itu Termohon kalau minta inzage yang dilihatkan P-1 sampai dengan P-13 saja.

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:28:41]

Izin, Yang Mulia. Kalau ini P-3 sampai P-13 ini, yang baru kita siapkan hari ini, seperti itu. Mohon untuk menyusul yang lainnya, karena didaftar alat bukti kita dari P3- sampai (...)

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:53]

Jadi, sudah saya sampaikan bahwa bukti Pemohon itu hanya sampai nanti jam 13.00 WIB.

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:00]

Ya disusul, Yang Mulia, sampai jam 13.00 WIB.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:02]

Ya, setelah jam 13.00 WIB sudah enggak ada lagi.

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:06]

Jadi, bukti tambahan sementara yang sudah masuk hari ini P-3 sampai P-13 (...)

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:10]

Oh, enggak bisa sementara, itu sudah harus pasti.

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:13]

Nanti jam 13.00 WIB kan kita tambahkan lagi, Yang Mulia.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:15]

Ya.

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:16]

Ya. Sampai jam 13.00 WIB kan?

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:17]

Ya, betul, Yang Mulia.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:18]

Selebihnya jam 13.00 WIB sudah ada.

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:21]

Ya ... ya, seperti itu maksudnya, Yang Mulia.

Maksudnya yang baru diterima tadi pagi baru sampai P-13, selebihnya nanti kita sampai jam 13.00 WIB, Yang Mulia.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:31]

Ini baru daftar bukti atau alat bukti? Alat buktinya sudah ada?

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:29:38]

Tadi pagi sudah ada.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:41]

Jadi, waktu Permohonan itu baru daftar bukti atau alat buktinya juga? Oh, sudah.

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:29:47]

Ya, sudah, Yang Mulia.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:47]

Jadi, jangan bingung gitu lho, ya. Yang jelas, jadi sudah disahkan Alat Bukti P-1 sampai dengan P-13 (...)

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:29:55]

P-13, sudah (...)

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:56]

Bersama dengan Permohonannya, kan? Ya?

904. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30:02]

Jadi, pada saat Permohonan, kami mengajukan Bukti P-1 sampai P-2.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:06]

P-1 sama P-2?

906. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30:09]

Kemudian, tadi pagi kami tambahkan Alat Bukti P-3 sampai dengan P-13.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:13]

Oke, sudah ada berarti.

908. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30:15]

Dan daftar alat bukti yang tertera dalam daftar alat bukti kami mengajukan bukti tambahan P-3 sampai P-1.085, Yang Mulia.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:23]

Nah itu P-3 sampai 1000 itu tadi, maksimal sampai jam 13.00 WIB.

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30:28]

Ya, betul, Yang Mulia. seperti itu.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:30]

Ya. Tapi, itu semuanya harus dileges dan sudah ada alat buktinya (...)

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30:33]

Ya, sudah siap, Yang Mulia.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:36]

Oke, cukup.

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:30:38]

Cukup, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:38]

Ya. Terima kasih. Harus jelas soalnya perlakuannya harus sama juga karena nanti akan direspons oleh (...)

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:30:47]

Siap, Yang Mulia.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:47]

Pihak Termohon dan Bawaslu.

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:30:50]

Sedang proses penggandaan Mulia ... Yang Mulia. Pengkopian.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:54]

Penggandaan kopian itu yang lama juga yang legesnya lho.

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:30:57]

Ya.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:58]

Ya.

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:30:59]

Siap.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:00]

Ya. Baik, terima kasih.

Ini sudah bilang *siap* lho, ya. Jadi, itu nanti yang tambahan kalau sebelum ... sesudah jam 13.00 WIB sudah enggak ada lagi. Kalau yang sebelum jam 13.00 WIB masuk itu akan disahkan bersamaan dengan bukti dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait, ya.

Baik, sekarang Perkara 16. Perkara 16, Partai Adil Sejahtera. Terus kemudian Pihak Terkaitnya Partai Gerindra. Ada Pihak Terkait? Oke, silakan direspons, ya, nanti, ya.

Jadi, ini begini. Pemohon dari Partai Adil Sejahtera, siap?

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:31:57]

Siap, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:58]

Oke. Pemohon ini menyampaikan ... saya minta klarifikasi dulu, menyampaikan Permohonan awalnya pada kapan?

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:32:09]

Awalnya pada tanggal 23 Maret, jam 14.00 WIB.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:013]

23 Maret, jam 14.00 WIB. Kemudian Perbaikannya?

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:32:18]

Perbaikan ... Perbaikan sebelum batas waktu, Yang Mulia.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:25]

Perbaikan sebelum batas waktu. Ini (...)

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:32:29]

Yakni tanggal 26 Maret ... jam 13.00 WIB.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:34]

Baik. Sekarang antara Perbaikan Permohonan dengan Permohonan awal itu terdiri dari lengkap ... yang perbaikan itu lengkap atau tidak lengkap?

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:32:45]

Lengkap, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:47]

Lengkap gimana? Ini Perbaikan Permohonan. Tidak ada identitas dan sebagainya. Kalau begitu kita harus mengertikan antara Permohonan awal dengan Perbaikan Permohonan merupakan satu kesatuan, gitu, kan?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:33:05]

Ya, satu kesatuan, Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:07]

Ya, tadi katanya lengkap apanya. Enggak lengkap kan ini? Kit ... kita membaca Permohonan.

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:33:15]

Ya.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:15]

Itu mestinya, lain kali untuk pelajaran Anda, dari Perbaikan itu juga dimasukkan yang ini. Ini kan berarti hanya tambahan. Ya, kan?

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:33:28]

Izin, Yang Mulia. Ini kan ... ini kan perubahan. Kalau perubahan, poin-poin yang dirubah saja yang saya sebutkan.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:37]

Oh, itu siapa yang bilang. Itu pengertian Pemohon yang salah, Kuasa Hukumnya. Tapi ini Mahkamah (...)

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:33:43]

Sebelumnya 5 tahun yang lalu seperti itu, Yang Mulia.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:46]

Enggak ada. Enggak ada 5 tahun yang lalu. Ini dibahas di dalam Hakim. Kalau Permohonan kayak begini itu harus bagaimana perlakuannya. Berarti antara Permohonan awal dan Permohonan Perbaikan merupakan satu kesatuan yang utuh.

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:34:04]

Ya, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:05]

Karena apa? Di perbaikan itu enggak ada identitasnya.

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:34:08]

Oh, Yang Mulia.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:09]

Ini hanya bagian yang diubah saja, ya, kan?

946. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:34:12]

Ya, benar, Yang Mulia.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:13]

Ya, ya, makanya itu. Jadi ini Pihak Terkait, Termohon harus ketahui. Kalau mempelajari Permohonan ini, harus dua-duanya dibaca. Karena dua-duanya ini di-upload oleh Mahkamah. Jadi yang direspons itu dua-duanya. Jadi mulai dari identitas dan sebagainya, itu ada di Permohonan awal. Tapi di Perbaikan Permohonan, itu hanya hal-hal yang diubah. Betul toh? Gitu toh?

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:34:48]

Betul.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:48]

Oh, ya.

950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:34:49]

Izin, Yang Mulia. Di perubahan juga kita sebutkan demikian perubahan dan perbaikan yang disampaikan.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:54]

Loh, ya. Tapi ini loh (...)

952. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:34:54]

Merupakan satu kesatuan, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:56]

Loh, ya. Ya, makanya itu sebetulnya. Kalau mau memperbaiki, ya, mulai awal ini diperbaiki, dimasukkan. Tapi kita membuat kebijakan, ya, karena tidak menyalahi aturan, maka dua-duanya ini di-upload. Kalau yang di-upload hanya ini gimana, yang perbaikan? Enggak tahu kan? Pemohon ... Termohon dan Pihak Terkait enggak tahu yang mau di-respons itu Permohonannya siapa.

954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:35:22]

Ya.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:22]

Lah, ya.

956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:35:24]

Kalau diperbaiki itu lebih terperinci, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:26]

Lho, ya, tapi identitasnya enggak ada ini.

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:35:29]

Ya, benar, Yang Mulia.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:30]

Ya kan? Makanya saya sampaikan, supaya Pemohon dan ... Termohon tahu dan Pihak Terkait tahu, ini merupakan satu bagian yang

utuh. Oleh karena itu ... kalau Mahkamah biasanya meng-upload, kalau yang awal itu belum di-upload, ada perbaikan yang di-upload perbaikannya.

960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:35:51]

Ya, benar, benar.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:52]

Tapi Mahkamah sudah mempelajari, oh ini kok hanya perubahan-perubahannya yang masuk diperbaiki, tapi ini tidak dimasukkan mulai identitas.

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:01]

Yang benar Permohonan ... Permohonan awal, Yang Mulia.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:04]

Nah, itu.

964. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:04]

Perubahan itu hanya tambahan (...)

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:05]

Permohonan awal, perubahannya hanya tambahan (...)

966. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:07]

Tambahan.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:09]

Kalau begitu. Ya, itu. Sekarang silakan disampaikan.

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:23]

Monggo, Yang Mulia.

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:23]

Kalau Kewenangan dianggap dibacakan.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:25]

Sudah ada wewenang, ya. Berwewenang.

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:27]

Ya. Kalau Kedudukan Hukum juga dianggap dibacakan.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:30]

Tenggang waktu, masih dalam tenggang waktu.

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:32]

Tenggang waktu, kita menyerahkannya pada tanggal 23 Maret.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:36]

23 Maret (...)

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:37]

Jam (...)

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:37]

Pukul 14.00 so ... siang, ya.

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:38]

Jam 14.00 siang.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:39]

Ya.

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:40]

Jadi yang menjadi Pokok Permohonan adalah per ... persandingan ... perolehan suara sah partai politik peserta ... KPU dari setiap daerah, pemilihan anggota DPRA 6 Kabupaten Aceh Timur. Yang menurut ... yang menurut Pemohon (...)

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

Hanya Aceh Timur, ya?

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:00]

Aceh Timur, ini. DPRA, Yang Mulia.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:59]

Ya.

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:59]

DPR Provinsi Aceh.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:02]

Ya, DPR Aceh.

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:37:03]

Yang kita persoalkan adalah (...)

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:04]

Aceh Timur berapa itu? Seluruhnya kabupaten?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:36:00]

Bukan, Yang Mulia. Aceh 6 namanya. Dapil Aceh 6.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:09]

Aceh 6.

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:37:10]

Dapil Aceh 6 itu di daerah Kabupaten Aceh Timur, Yang Mulia.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:13]

Aceh Timur, ya.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:37:15]

He eh.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:15]

Ya, terus?

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:37:16]

Menurut Pemohon, jumlah suara Partai Adil Sejahtera itu jumlahnya 6 ... 16.929.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:26]

Oke.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:37:27]

Menurut Termohon juga seperti itu.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:29]

Ya.

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:37:29]

Sedangkan, Partai Gerindra menurut Pemohon 14.935 suara. Sedangkan menurut Termohon itulah 19.069 suara. Ada selisih 4.134 suara. Selisih suara tersebut terjadi karena adanya penggelembungan suara di 4 kecamatan di daerah Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:59]

Ya.

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:02]

Di ... yang pertama adalah penggelembungan (...)

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:07]

Sebentar, itu berapa TPS itu? Di 4 kecamatan itu berapa TPS itu?

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:12]

190 TPS, Yang Mulia.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:14]

190 TPS.

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:16]

Ya.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:17]

Ini mempersoalkan suara 4.100 (...)

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:21]

34 suara.

1007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:22]

34.

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:24]

Penggelembungan.

1009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:24]

Yang dilakukan ... yang diperoleh oleh Gerindra?

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:27]

Yang diperoleh oleh Gerindra, Yang Mulia.

1011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:27]

Oke. Terus? Apa saja dalilnya?

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:33]

Dalilnya.

1013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:33]

Sudah pernah di anu (...)

1014.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:34]

Ada.

1015.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:35]

Dipersoalkan?

1016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:36]

Kenapa, Yang Mulia? Kita juga pernah melakukan ... apa namanya ... keberatan dan sanggahan di setiap apa ... tingkatan di PPK.

1017.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:43]

Oke.

1018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:45]

He eh.

1019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:45]

Terus?

1020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:46]

Dan sudah dapat rekomendasi juga dari panwaslih untuk ... untuk dilakukan perbaikan. Ternyata dari Pihak Termohon dalam hal ini (...)

1021.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:53]

Perbaikannya itu perbaikan apa? Rekapitulasi atau (...)

1022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:38:57]

Rekapitulasi, Yang Mulia.

1023.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:57]

Rekapitulasi. Itu yang anu Nomor 004 itu?

1024.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:02]

Ya, Yang Mulia.

1025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:03]

Oke. 13 Maret 2024?

1026.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:06]

Ya, Yang Mulia.

1027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:10]

Oke. Terus ada dalil yang lain?

1028.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:12]

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

1029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:13]

Petitem, ya. Jadi persandingan Anda di dalam Petitem?

1030.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:20]

Menetapkan. Langsung saja, Yang Mulia, ya.

1031.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:24]

Ya.

1032.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:24]

Menetapkan hasil persoalan ... perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh daerah pemilihan sebagai berikut.

Satu, untuk Partai Aceh perolehan suara adalah 89.511 suara.

1033.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:38]

Oke.

1034.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:39]

Dua, Partai Nasdem 21.006 ... 600 ... 664 suara.

1035.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:44]

Ya.

1036.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:44]

Untuk Partai Kebangkitan Bangsa 17.997 suara.

1037.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:49]

Oke.

1038.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:49]

Empat, Partai Adil Sejahtera Aceh (...)

1039.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:52]

Menjadi (...)

1040.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:53]

Menjadi (...)

1041.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:53]

Itu berarti 16.000?

1042.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:54]

Enggak ini tetap.

1043.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:55]

Tetap.

1044.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:55]

Kalau suara dari Pemohon itu tetap, Yang Mulia.

1045.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:58]

Oke.

1046.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:39:58]

Yang kita persoalkan itu adalah penambahan suara untuk Partai Gerindra.

1047.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Partai Gerindra?

1048.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:01]

Ya.

1049.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:02]

Terus Partai Gerindra itu suaranya yang dikurangi itu dimasukkan ke mana?

1050.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:08]

Kenapa, Yang Mulia?

1051.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:10]

Kan berarti Gerindra harus berkurang (...)

1052.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:13]

Suara Gerindra itu enggak ada, Yang Mulia. Maksudnya jumlah seperti itu. Tapi ada terjadi penggelembungan suara 400 (...)

1053.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:17]

Oke.

1054.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:18]

He eh, masuk ke mana kita enggak tahu (...)

1055.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:19]

4 ... 4.134 itu?

1056.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:21]

Ya.

1057.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:22]

Oke.

1058.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:22]

He eh, terus (...)

1059.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:24]

Jadi Partai Adil Sejahtera itu tetap (...)

1060.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:26]

Suaranya tetap, Yang Mulia. Yang kita persoalkan itu adalah (...)

1061.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:30]

Oke.

1062.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:31]

Penambahan suara kepada Partai Gerindra, Yang Mulia.

1063.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:32]

Gerindra.

1064.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:34]

Di 4 kecamatan.

1065.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:35]

Oke. Berarti Gerindra menjadi 14.935 (...)

1066.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:39]

14.935 suara.

1067.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:40]

Oke.

1068.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:40:41]

Dengan demikian, perolehan kursi masing-masing, kursi pertama, kedua, dan kelima adalah untuk Partai Aceh, kursi ketiga adalah untuk Partai Nasdem, kursi keempat untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kursi keenam, DPRA Dapil Aceh 6, jadi milik Partai Adil Sejahtera, Termohon[sic!], Yang Mulia.

1069.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:58]

Oke.

1070.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:01]

Sekian, Yang Mulia.

1071.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:02]

Suara yang benar ini, ya (...)

1072.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:03]

Suara yang benar (...)

1073.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:03]

Kalau masalah kursinya itu KPU yang menetapkan?

1074.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:07]

Ya, Yang Mulia.

1075.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:08]

Oke. Jadi Partai Gerindra jadi enggak dapat kursi kalau begini?

1076.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:13]

Ya, Yang Mulia.

1077.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:13]

14.000, ya? Jadi Partai Aceh dapat berapa suara kalau itu ... eh ... dapat berapa kursi kalau begitu?

1078.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:19]

Tiga kursi.

1079.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:20]

Tiga kursi.

1080.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:21]

Partai Aceh, Yang Mulia.

1081.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:22]

Nasdem?

1082.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:23]

Satu kursi (...)

1083.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:23]

Satu. PKB, satu.

1084.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:26]

PKB, satu.

1085.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Terus kemudian Adil Sejahtera, satu juga.

1086.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:29]

Satu. Di Dapil Aceh 6 itu (...)

1087.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:32]

Ya.

1088.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:32]

Itu enam kursi, Yang Mulia.

1089.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:33]

Enam kursi, ya?

1090.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:34]

He eh.

1091.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:35]

Enam kursi, ya. Oke. Tapi ini kita permintaannya suara yang benar, ya?

1092.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:40]

Ya, suara yang benar, Yang Mulia.

1093.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:41]

Ya, cukup?

1094.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:42]

Cukup, Yang Mulia.
Pengesahan alat bukti, Yang Mulia.

1095.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:45]

Ya, belum, jangan disuruh saya. Nanti kalau belum ditutup pengesahan alat bukti.

Prof Enny, ada? Cukup, ya?

Saudara mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-207.

1096.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:41:59]

Ya, benar, Yang Mulia.

1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:03]

Betul?

1098.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:42:03]

Betul, Yang Mulia.

1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:04]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Lain kali, ini siapa namanya? Pak siapa? Pak Sayuti?

1100.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:42:12]

Ya, Yang Mulia.

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:13]

Pak Sayuti kalau buat anu ... Perbaikan Permohonan itu dilengkapi seluruhnya, ya?

1102.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:42:19]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:20]

Nanti di PUU juga begitu, semuanya kalau perbaikan, dari yang awal itu dimasukkan lagi di ... utuh, ya. Ya, terima kasih, Pak Sayuti.

Sekarang perseorangan 121 atas nama Pak Subki Tgk. Jek. Siapa? Pemohonnya? Oh, di belakang? Oh, ini cewek sendiri di sarang penyamun itu. Maju, Mbak! Itu masih ada yang kosong itu. Ya, gantian, gantian. Ini cewek sendiri, ibu-ibu sendiri di sarang penyamun. Kuasa hukumnya ini, Bu Maya Indrasari?

1104.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:43:20]

Ya, Yang Mulia.

1105.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:21]

Oke. Silakan disampaikan.

1106.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:43:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

1107.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:28]

Ya.

1108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:43:30]

Sebelumnya perkenankan, saya Maya Indrasari sebagai Kuasa Hukum dari Partai Politik, Partai Adil.

1109.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:41]

Ya. Mewakili untuk calon perseorangan, ya?

1110.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:43:47]

Ya, Yang Mulia.

1111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:49]

Baik, yang dimohonkan betul obyeknya pembatalan Putusan KPU 360/2024, kemudian permohonan perseorangan, ada rekomendasi dari surat-surat persetujuan Partai Adil Sejahtera, ya, betul?

1112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:06]

Ada, Yang Mulia.

1113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:07]

Nomor 28 dan seterusnya itu tang ... tanggal 21 Maret 2024?

1114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:12]

Benar, Yang Mulia.

1115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:13]

Betul. Untuk Kewenangan gimana? Ada kewenangan?

1116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:16]

Kewenangan kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:18]

Ada, ya. Terus, tenggang waktu masih?

1118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:21]

Tenggang waktu, kami mendaftar di tanggal 23 Maret.

1119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:26]

Ya. Pukul berapa?

1120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:27]

Pukul 19.56 WIB.

1121.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:29]

Ok. Terus (...)

1122.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:31]

Kemudian dilakukan perbaikan di tanggal 26 Maret 2024, pukul 13.18 WIB.

1123.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:34]

Ya. Masih dalam tenggat waktu. Kedudukan hukum, punya kedudukan hukum karena juga ada rekomendasi, ya?

1124.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:42]

Ya, Yang Mulia.

1125.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:47]

Ada rekomendasi. Rekomendasinya dari DPP Partai Adil Sejahtera, ya? Partai lokal ini berarti, ya?

1126.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:53]

Ya, Yang Mulia.

1127.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:54]

Yang tanda tangan, siapa di situ?

1128.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:56]

Di sini ada teuku haji (...)

1129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:58]

Ketua umum dan sekjenya?

1130.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:44:59]

Ya.

1131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:00]

Ok. Terus yang dipersoalkan apa, Mbak?

1132.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:03]

Mengenai tentang penambahan suara dalam satu partai Nomor Urut 5.

1133.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:11]

Oke. Ini Pemohon nomor urut berapa jadinya?

1134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:16]

Nomor 1.

1135.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:17]

Nomor Urut 1. Berhadapan dengan Nomor Urut 5?

1136.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:22]

Ya.

1137.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:23]

Muhammad Daud?

1138.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:24]

Ya.

1139.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:25]

Ok. Yang dipersoalkan di TPS mana ini?

1140.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:29]

Terjadi penggelembungan suara terhadap caleg Nomor 5 (...)

1141.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:33]

He em.

1142.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:34]

Di 2 kecamat ... 2 kecamatan, yaitu Peureulak Timur.

1143.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:38]

2 kecamatan (...)

1144.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:39]

Dan Rantau Peureulak.

1145.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:40]

Ya. Berapa TPS itu?

1146.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:42]

Untuk ... untuk Peureulak Timur (...)

1147.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:46]

Peureulak Timur. Berapa TPS?

1148.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:45:48]

Izin, Yang Mulia. Saya lihat dulu sebentar.

1149.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:50]

Oh, ya, udah. Kalem saja. Kalau yang bapak-bapak biar cepat, tapi kalau yang perempuan suaranya kan lain. Jadi kita perlahan-lahan. Jadi di 2 kecamatan, 1 Peureulak Timur.

1150.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:06]

Ya.

1151.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:07]

TPS berapa?

1152.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:09]

Kita tidak tahu di TPS berapa, Yang Mulia, tapi itu (...)

1153.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:12]

Berapa TPS di situ? Peureulak Timur berapa TPS?

1154.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:20]

Lebih kurang, saya tidak tahu pasti, Yang Mulia, tapi (...)

1155.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:22]

Nanti Termohon yang tahu, ya?

1156.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:23]

Ya.

1157.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:24]

Biar Termohon. Jadi terdiri di 2 kecamatan.

1158.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:28]

Ya, 2 kecamatan.

1159.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:29]

Total TPS-nya berapa di 2 kecamatan itu?

1160.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:28]

100 ... 198, kalau enggak salah.

1161.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:45]

198, kalau enggak salah.

1162.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:46]

Ya, kalau tidak salah.

1163.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:49]

Ya. Yang dipersoalkan, berapa suara?

1164.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:52]

Yang dipersoalkan, terjadi penambahan suara untuk Nomor Urut 5 itu di Kecamatan Peureulak Timur itu sebanyak 215 suara.

1165.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:06]

215 suara. Di mana itu kok enggak ada di sini?

1166.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:11]

Itu 215 suara, itu kita lihat dari hasil D-nya, Yang Mulia.

1167.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:17]

Oke.

1168.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:18]

Kemudian di ... untuk Rantau Peureulak-nya terjadi penambahan suara 62 suara.

1169.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:24]

Oke.

1170.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:25]

Sehingga, jika ditotalkan kita menjadi kalah ... menjadi kalah 77 suara yang mengakibatkan menggeser ... tergesernya jatah kursi kita, gitu, Yang Mulia.

1171.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:40]

Terus ini kok begini? Menurut Permohon, 151 suara. Menurut Termohon, 151. Jadi, tidak ada selisih benarnya, itu sebenarnya.

1172.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:46:58]

Ya, untuk kami tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan.

1173.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:00]

Muhammad Daud itu ada satu ... menurut Pemohon hanya 924, sedangkan Termohon menentukan 100 ... 1.201, ada selisih 277 suara. Ini Permohonan kapan, ini? Kok kayak begini yang dibacakan beda ini?

1174.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:48:24]

Izin, Yang Mulia, diperbaiki, Yang Mulia.

1175.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:36]

Ya, sudah kalau begitu. Jadi yang dipersoalkan, berapa suara yang dipersoalkan?

1176.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:48:41]

Terjadinya penambahan suara untuk Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 215 suara, kemudian di Rantau Peureulak sebanyak 62 suara?

1177.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:53]

Ya, oke. Terus sekarang suara yang benar yang diminta ke Mahkamah?

1178.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:49:04]

Suara yang benar kami mene ... meminta untuk menetapkan.

1179.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:08]

He eh.

1180.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:49:09]

Di Peureulak Timur, Muhammad Daud memperoleh 23 suara, kemudian di Rantau Peureulak dia memperoleh 901 suara.

1181.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:18]

900 suara?

1182.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:49:09]

901 suara.

1183.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:22]

901. Muhammad Daud hanya 20 (...)

1184.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:49:25]

Ya.

1185.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:26]

3.

1186.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:49:27]

Di Peureulak Timur.

1187.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:28]

Di Peureulak Timur. Oke, terus sekarang bacakan Petitumnya.

1188.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:49:37]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 dan seterusnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

sepanjang daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

Tiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara-suara ulang pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Rantau Peureulak di daerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau menetapkan hasil perolahan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur di daerah Pemilihan Aceh Timur II sebagai berikut. Untuk ... untuk Pemohon tetap. Untuk Muhammad Daud 23 suara di Kecamatan Peureulak Timur (...)

1189.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:32]

Tetapnya itu berapa? Disebutkan angkanya.

1190.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:50:35]

Untuk Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 104 suara.

1191.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:38]

Ya.

1192.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:50:39]

Di Kecamatan Rantau Peureulak 47 suara.

1193.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:42]

Oke.

1194.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:50:44]

Untuk ... untuk Muhammad Daud, 23 suara di Peureulak Timur.

1195.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:47]

Ya.

1196.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:50:48]

Di Kecamatan Rantau Peureulak 901 suara.

1197.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:52]

Oke.

1198.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:50:53]

Empat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

1199.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:02]

Ya.

1200.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:51:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

1201.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:03]

Terima kasih.
Prof. Enny, ada?

1202.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:07]

Baik, terima kasih. Ini kan Pemohonnya partai politik, ya. Jadi yang disebut *Pemohon-Pemohon* tadi di sini partai politik maksudnya. Partai politik tetapi yang dipersoalkan perseorangan (...)

1203.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:51:18]

Ya.

1204.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:18]

Dari partai politik itu. Jadi yang sama-sama ini anggota dari partai PAS kan ini? Dua-duanya, baik Subki maupun Muhammad Daud itu. Jadi kalau menyebutkan *Pemohon* agak bingung saya. Ini Pemohonnya Muhammad Daud atau Subki, sama-sama anggota partai politik semua dua-duanya ini.

1205.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:51:36]

Izin, Yang Mulia, sebelumnya dari ketua DPP-nya sudah mengirimkan surat kepada KIP juga, ke panwaslih juga, mengenai tentang keberatan penambahan suara terhadap Nomor Urut 5 tersebut.

1206.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:50]

Ya, enggak, ini maksud saya, karena kebetulan ini dari partai politik yang mengajukan.

1207.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:51:54]

Ya.

1208.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:54]

Tapi yang dipersoalkan ini adalah anggota dari partai politiknya itu.

1209.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:51:59]

Ya.

1210.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:59]

Calegnya itu loh?

1211.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:00]

Ya.

1212.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:00]

Yang dua-duanya dari PAS semua, partai yang sama.

1213.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:02]

Ya.

1214.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:03]

Ya. Jadi menyebutkan Pemohon. Nah, Pemohonnya ini adalah partai politik, ya. Tapi yang dipersoalkan perseorangan, ya. Di sini kemudian ada selisih tadi 215, itu enggak ada buktinya, dari bukti apa itu?

1215.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:16]

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya kita kan sudah (...)

1216.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:18]

Bukti D atau bukti C?

1217.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:20]

Ada bukti kita, ada bukti C, tapi bukti C-nya belum kita tambahkan.

1218.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:25]

Jangan pakai kita, kalau kita termasuk saya. Ya. *Kami* saja boleh.

1219.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:28]

Ya. Kami (...)

1220.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:29]

Nanti dikira saya ikut-ikutan nanti di situ.

1221.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:30]

Ya. Ya, Yang Mulia. Kami punya Bukti C.Hasil.

1222.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:35]

Ya. C.Hasilnya ada?

1223.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:36]

Tapi belum ... kami tambahkan ... belum kami tambahkan (...)

1224.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:38]

Itu di TPS mana saja bisa diuraikan?

1225.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:40]

Bisa.

1226.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:41]

Di TPS mana saja yang bertambah selisihnya sampai 215, dari Muhammad Daud, kan gitu?

1227.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:45]

Muhammad Daud pengelembungan suaranya terjadi di D, Yang Mulia.

1228.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:49]

Oh, di D.

1229.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:50]

Di D.

1230.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:51]

Di C-nya enggak ada persoalan?

1231.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:52]

Di C-nya, tidak ada.

1232.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:53]

Ada persandingan C sama D?

1233.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:52:54]

Ada.

1234.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:55]

Tolong ditambahkan uraian soal itu, ya. Kemudian yang ini ... yang di apa ... Peureulak ... Rantau Peurelak itu 62 selisihnya.

1235.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:04]

Ya.

1236.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:04]

Untuk Daud, ya. Itu di TPS mana juga sudah ada?

1237.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:09]

Kalau mengenai penambahannya kan di D, Yang Mulia. Di D (...)

1238.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:12]

Di D, semua ada?

1239.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:13]

Kita tidak mempunyai lampirannya, kita hanya punya di sana.

1240.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:16]

Ya. Yang 62 itu? 62. Selisih 62 itu, ada buktinya di mana? D?

1241.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:20]

Di D.

1242.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:21]

Oh, di D. Di C-nya enggak ada persoalan?

1243.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:23]

Di C tidak ada persoalan.

1244.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:24]

Nah, itu tolong disandingkan nanti, ya. Ini sudah ada keberatan belum disampaikan kepada panwaslu atau Bawaslu?

1245.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:29]

Sudah.

1246.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:30]

Sudah.

1247.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:31]

Tapi tidak ada respons, Yang Mulia.

1248.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:32]

Tolong nanti ditindaklanjuti, ya. Direspons ini, ya. Dari Bawaslu termasuk dari KPU terkait dengan selisih suara tersebut, ya. Demikian Pak Ketua.

1249.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:42]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Anwar, Cukup? Ya, baik.
Ini Pemohon mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-6, ya.

1250.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:52]

Ya, Yang Mulia.

1251.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:53]

Yang sudah ada, ya?

1252.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:54]

Ya. Nanti mau (...)

1253.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:55]

Tapi mau ditambahkan?

1254.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:56]

Ya.

1255.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:57]

Tapi tadi, ya. Sebelum jam 13.00 WIB, ya.

1256.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:53:59]

Ya.

1257.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:00]

Oke. Terima kasih.
Disahkan P-1 sampai dengan P-6.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

1258.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:54:07]

Cukup, Yang Mulia.

1259.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:08]

Baik. Terima kasih.

Sekarang Perkara Nomor 25. Perkara Nomor 25. Perseorangan PKS atas nama Muhammad Yusuf.

1260.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:43]

Ya.

1261.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:47]

Oh, ini yang HP-nya bunyi. Oh, silakan masuk. Tadi di mana diundang? Ya, HP-nya bunyi. Dia maju sendiri berarti enggak ada kuasa hukumnya, ya? Oh, Prinsipal. Silakan, Pak, duduk di depan sini! Handphone-nya sudah dimatikan? Ya, silakan.

Ini Pak Sop ini panggil ... panggilannya, ya?

1262.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:34]

Pak Yusuf. Mohon, Yang Mulia.

1263.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:36]

Ha? Kok ada Pak Sop ini?

1264.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:38]

Pak Sop, Muhammad Yusuf, dalam kurung (...)

1265.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:39]

Oh, Pak Muhammad Yusuf panggilannya, Pak Sop?

1266.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:41]

Pak Sop.

1267.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:42]

Oke.

1268.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:43]

Kalau orang Aceh kayak gitu, Pak.

1269.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Oke. Ya ini Pak Yusuf maju sebagai perorangan?

1270.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:52]

Ya, ya, Yang Mulia.

1271.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:53]

Dari partai apa?

1272.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:54]

Partai PKS, Yang Mulia.

1273.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:56]

Partai Keadilan Sejahtera?

1274.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:54:58]

Ya.

1275.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:00]

Mengajukan perorangan ada rekomendasi dari partainya?

1276.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:56:05]

Sudah saya ajukan.

1277.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:07]

Tapi enggak ada. Ha? Begini, Pak Yusuf.

1278.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:56:14]

Ya, Yang Mulia.

1279.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:15]

Untuk permohonan yang diajukan partai, itu harus ditandatangani oleh sekjen ... ketua umum dan sekjen. Atau kalau PKS, kalau enggak salah, menggunakan istilah presiden dan sekretarisnya, ya, kan?

1280.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:56:34]

Ya, Yang Mulia.

1281.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:34]

Atau istilah lain. Nah ini perseorangan, kalau perseorangan itu harus izin kepada DPP partainya.

1282.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:56:43]

Ya, Yang Mulia.

1283.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:44]

Ada rekomendasi dari partainya. Nah, sampai hari ini, pada waktu pengajuan Permohonan, Pak Yusuf, belum ada rekomendasi dari partai, boleh enggak bersengketa di Mahkamah Konstitusi? Sudah ada rekomendasi? Belum, ya?

1284.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:57:00]

Belum, belum saya.

1285.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:01]

Belum.

1286.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:57:02]

Tapi sudah ... sudah diajukan, Yang Mulia.

1287.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:04]

Ya, tapi kan belum?

1288.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:57:08]

Ya.

1289.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:09]

Belum disetujui. Nah kalau belum disetujui itu, biasanya bisa terjadi mahkamah partailah yang akan menyelesaikan persoalan sengketa itu. Kan Bapak bersengketa dengan temannya di partai yang sama, kan?

1290.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:57:21]

Ya, Yang Mulia.

1291.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:22]

Nah, itu. Biasanya partai mengambil kebijakan, nah sudahlah diselesaikan internal. Nah kalau tidak bisa diselesaikan, misalnya win-win solution, ya, sudah, misalnya Pak Yusuf bersengketa dengan siapa di sini?

1292.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:57:38]

Saya mohon, Yang Mulia, kalau di sana sudah saya ajukan, tapi orang itu enggak menanggapi, makanya saya ajukan kembali.

1293.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:45]

Ya, kalau bersengketa itu bersengketa dengan teman satu partainya.

1294.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:57:50]

Ya, Yang Mulia.

1295.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:51]

Ya. Nah biasanya kalau tidak disam ... ada rekomendasi, itu akan diselesaikan oleh partainya. Nah, kalau diselesaikan oleh partainya, biasanya win-win solution. Ya, sudah, karena jabatan anggota DPR atau DPRD itu lima tahun, dua setengah, dua setengah, nanti berganti-ganti, pergantian, bisa begitu. Oleh karena itu, penting sekali menjadi syarat formil, harus ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan. Tapi sampai hari ini Pak Yusuf belum mendapat rekomendasi itu. Tapi kalau ini tetap diajukan, monggo silakan, kita akan lihat, nanti Mahkamah memutuskannya bagaimana, ya?

1296.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:58:33]

Ya, Yang Mulia.

1297.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:34]

Oke, silakan. Kalau begitu dibacakan Permohonannya. Ini Permohonannya Pak Yusuf, hanya satu lembar ini. Ini kan Permohonannya?

1298.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:58:45]

Ya, ya.

1299.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:47]

Oke. Terus kalau kewenangannya Pak Yusuf punya enggak, menurut Pak Yusuf? Apakah Mahkamah berwenang menjadi lembaga yang mengadili persoalan yang diajukan Pak Yusuf?

1300.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:59:02]

Menurut saya, Yang Mulia, karena dia melambungkan suara, maka saya tidak terima, saya mengajukan ke PPK kecamatan, tapi tidak ini, sampai ke kabupaten. Kalau kabupaten ini enggak ... enggak diterima, saya ajukan ke mari, Yang Mulia.

1301.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:18]

Ya, tapi begitu tadi. Yang dipersengketakan itu di sini perihal Permohonan, itu hanya mengatakan menolak hasil pemilu dan kebijakan partai.

1302.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:59:31]

Ya.

1303.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:32]

Padahal yang menjadi objek mestinya putusan ... pembatalan Putusan Mah ... Putusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Tapi Pak Yusuf

yang dijadikan objek Permohonan adalah penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai.

1304.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [01:59:53]

Ya, Yang Mulia.

1305.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:57]

Itu. Dari situ maka Mahkamah bisa saja berkesimpulan, ada dua, objeknya salah, sehingga Mahkamah tidak berwenang atau dianggap objeknya itu betul, Mahkamah berwenang, tapi itu nanti penilaian Hakim kita bersembilan. Tapi di dalam persidangan ini perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi objek itu adalah pembatalan Putusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bukan objeknya, bukan penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai, itu.

Terus kemudian tenggang waktunya, tenggang waktunya diajukan kapan ini, Hari Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024, pada pukul 19.43 WIB, padahal paling lambat kapan? Itu 2x ... 2 ... 3X24 jam setelah KPU memutuskan. Dari sini, maka sebetulnya Permohonannya yang diajukan Pak Yusuf sudah melewati tenggang waktu.

Kemudian Kedudukan Hukumnya, kedudukan hukum itu bisa perorangan dari partai apapun, tapi harus mendapat rekomendasi dari partainya. Permohonan Bapak itu tidak ada rekomendasi. Jadi tidak mempunyai kedudukan hukum.

Terus kemudian yang dipersengketakan, yang dipersengketakan itu tidak ada Posita yang jelas. Kemudian tidak ada Petitumnya. Ini kita bacakan hanya satu lembar saja, ya, "Saya, nama, dan seterusnya, menolak terhadap hasil penghitungan suara di Dapil 6 Aceh Utara di kecamatan ... dikarenakan hilangnya C-1 oleh oknum tertentu."

1306.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:02:02]

Betul, Yang Mulia.

1307.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:03]

Jadi hanya begini saja. Nah, kalau begini saja, tadi kesimpulannya. Satu, Mahkamah tidak berwenang, dua, tenggang waktunya sudah lewat, yang ketiga, kedudukan hukumnya tidak punya

kedudukan hukum karena tidak direkomendasikan oleh Mahkamah. Itu yang bisa saya jelaskan.

Gimana, Pak Yusuf?

1308.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:02:30]

Yang Mulia, karena dari sana tidak diterima, makanya saya mengajukan ke mari.

1309.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:35]

Ya, makanya itu kalau mengajukan ke mari (...)

1310.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:02:37]

Ya.

1311.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:35]

Mengajukan ke mari boleh-boleh saja, tapi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk mengajukan permohonan. Nah ini syarat formil tidak terpenuhi, syarat materiil juga tidak terpenuhi itu. Ya, Pak Yusuf, ya.

1312.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:02:56]

Ya.

1313.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:57]

Ada lagi yang ingin disampaikan?

1314.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:03:02]

Kalau menurut saya, belum puas karena saya sudah ajukan itu suratnya.

1315.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:09]

Lho ya, kalau mengajukan boleh-boleh saja, boleh-boleh saja mengajukan, tapi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Ini lho Pak Yusuf, contohnya. Contohnya itu ada permohonan yang sampai setebal ini. Ini coba. Ini permohonannya tebal segini, ini ada buktinya begini.

Nah, Bapak itu tidak ... hanya satu lembar, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Nah terus gimana, harus puas?

1316.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:03:49]

Ya, Yang Mulia.

1317.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:52]

Ya, cukup, ya?

1318.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:03:52]

Cukup.

1319.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:53]

Terima kasih, Pak Yusuf yang telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah. Ini juga tidak ada alat bukti, tidak ada apa-apanya. Jadi tadi saya kata ... sampaikan bahwa mengajukan Permohonan ke Mahkamah itu harus ada syarat formil dan syarat materiil. Dan biasanya kalau permohonan perseorangan atau permohonan partai pun tidak bisa mengajukan sendiri, biasanya menggunakan kuasa hukum, supaya permohonannya baik, bisa memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Makanya Pak Yusuf bisa dilihat, ini mereka berbaju advokat, karena yang tahu persis bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah.

Kemudian ini KPU. KPU juga ... ini bosnya KPU pakai peci ini, Beliau enggak bisa sendiri, makanya beliau didampingi oleh Penasihat Hukum yang pakai hitam-hitam.

Pihak Terkait juga begitu, ini Pihak Terkaitnya orang-orang juga partai, tapi enggak bisa maju sendiri karena enggak tahu bagaimana harus membuat tanggapan, respons dan sebagainya, sehingga pakai advokat, begitu, ya, Pak Yusuf, ya?

1320.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD YUSUF [02:05:08]

Ya, Yang Mulia.

1321.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:09]

Terima kasih. Sudah cukup, ya? Oke.

Sekarang Perkara Nomor 13 Partai Gerindra, terus Pihak Terkaitnya PDIP dan PKS. Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada?

1322.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BUSYRAA [02:05:36]

Hadir, Yang Mulia.

1323.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:38]

PKS ada? Oke, di belakangnya. Maju aja, Mas.

1324.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:05:54]

Izin, Yang Mulia.

1325.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:55]

Silakan.

1326.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:05:57]

Kami dari Partai Gerindra untuk Perkara Nomor 13, Kedudukan Hukum Pemohon Nomor Urut 2.

1327.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:15]

Kewenangan dulu.

1328.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:20]

Kewenangannya, kami mengajukan (...)

1329.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:24]

Kewenangan, berwenang, ya?

1330.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:25]

Berwenang, Yang Mulia.

1331.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:25]

Jadi yang dipersoalkan objeknya pem ... Pembatalan Putusan KPU 360 Tahun 2024, ya?

1332.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:33]

Siap, Yang Mulia.

1333.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:34]

Oke, Kewenangan, Mahkamah berwenang. Tenggang waktu (...)

1334.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:39]

Tenggang waktu (...)

1335.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:40]

Masih dalam tenggang waktu, karena kapan mengajukannya?

1336.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:43]

Tanggal 23 Maret, Yang Mulia.

1337.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

23 Maret 2024. Oke, terus, Kedudukan Hukum?

1338.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:51]

Kedudukan Hukum (...)

1339.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:52]

Memiliki kedudukan hukum.

1340.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:54]

Ya.

1341.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:54]

Karena partai, ya?

1342.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:06:55]

Partai.

1343.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:55]

Oke. Dalam Posita, yang pertama yang dipersoalkan adalah pengisian keanggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1.

1344.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:05]

Ya, Yang Mulia. Untuk (...)

1345.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:07]

Gimana itu? Apa dalilnya?

1346.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:10]

Dalilnya, persandingan perolehan suara ... dalilnya ini, Yang Mulia.

1347.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:16]

Gimana?

1348.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:17]

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kur ... kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1, untuk keperolehan kursi kedelapan atau kursi terakhir.

1349.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:28]

Oh ini ... anu ... yang diperbutkan suara yang kedelapan, ya? Anu (...)

1350.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:33]

Ya, Yang Mulia.

1351.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:33]

Kursi yang kedelapan?

1352.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:34]

Kursi yang kedelapan.

1353.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:35]

Oke.

1354.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:38]

Bahwa menurut Pemohon, adanya perselisihan perolehan suara sebagaimana tabel di atas, disebabkan oleh adanya penambahan atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon sebagaimana diuraikan.

1355.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:52]

Jadi begini, sebentar. Gerindra itu menurut Pemohon?

1356.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:07:57]

Menurut Pemohon (...)

1357.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:57]

104.005 Suara.

1358.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:08:00]

104.005 Suara. Tetap, Yang Mulia.

1359.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:02]

Tetap, tapi ada penggelembungan (...)

1360.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:08:04]

Penggelembungan.

1361.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:04]

Di suara PDIP?

1362.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:07]

Di PDIP, dan PKS, dan PKB.

1363.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:09]

Kalau, PDIP menurut Pemohon mestinya berapa?

1364.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:11]

98.120.

1365.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:14]

Oke, yang ditetapkan Termohon?

1366.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:17]

133.292.

1367.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:19]

Oke, jadi ada penambahan suara 35.172.

1368.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:24]

Siap, Yang Mulia.

1369.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:24]

Oke, sedangkan PKS?

1370.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:27]

Begitu juga untuk PKS, menurut Pemohon 98.750.

1371.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:32]

Oke.

1372.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:34]

Sedangkan menurut Termohon 119.581.

1373.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:39]

19. Nah, persoalan penggelembungan suara atau penambahan suara itu terjadi di mana? 18 kecamatan?

1374.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:46]

Terjadi di 34 kurang lebih, Yang Mulia.

1375.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:48]

Enggak, pertama di 18 kecamatan dulu PDIP.

1376.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:52]

Ya, Yang Mulia.

1377.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:54]

Total suara ini? 15.342.

1378.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:08:]

Ya, Yang Mulia.

1379.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:59]

Oke, terus kemudian di 7 Kecamatan Pidie. Ya, Toh?

1380.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:05]

Ya. Terjadi di kepa ... Kabupaten Pidie, Kecamatan Tiji, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Komala.

1381.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:16]

Subulussalam.

1382.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:17]

Subulussalam (...)

1383.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:17]

Simeulue, Banda Aceh.

1384.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:21]

Ya, Kecamatan Mutiara Timur.

1385.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:23]

Ya, itu total suaranya ini yang ditunjukkan ini, ya?

1386.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:27]

Ya, Yang Mulia.

1387.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:27]

Oke, kemudian yang kedua yang terhadap PKS di mana itu?

1388.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:32]

Ya, Yang Mulia.

1389.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:33]

Di 4 kecamatan. Kecamatan Bandar Baru, Dalur Imarah, Peukan Baro, dan Pidie. Jumlah total yang dipersengketakan 5.831, gitu?

1390.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:46]

Ya, 50 ... 5.000, Yang Mulia.

1391.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:47]

Oke. Terus yang (...)

1392.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:50]

Dan untuk (...)

1393.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:51]

PKB?

1394.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:09:52]

Yang ke-3 untuk Partai PKB terjadi pada tingkat rekapitulasi tingkat PPK, dimana perolehan partai berdasarkan (...)

1395.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:58]

8 kecamatan?

1396.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:00]

C.Hasil, ya.

1397.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:01]

Kecamatannya mulai Tiro sampai Batee itu?

1398.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:03]

Ya, Yang Mulia.

1399.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:04]

1.110 suara?

1400.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:07]

Sebanyak itu, Yang Mulia.

1401.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:08]

Ya, toh?

1402.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:09]

Ya.

1403.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:09]

Itu yang dipersengketakan. Terus Anda menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-40?

1404.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:18]

Ya, Yang Mulia.

1405.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:19]

Ya, itu didukung bukti itu. Kemudian sekarang suara yang benar, gimana itu?

1406.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:30]

Suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai PDI, 98.120.

1407.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:37]

Ya, Gerindra jadi berapa?

1408.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:39]

Gerindra tetap, Yang Mulia.

1409.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:40]

Tetap 104. 005 itu?

1410.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:43]

Ya.

1411.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:44]

5.000?

1412.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:44]

Ya.

1413.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:45]

Ini hasil terakhir, ya. Kemudian PKS jadi 98.750 (...)

1414.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:50]

750.

1415.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:50]

PKB=80.000 (...)

1416.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:10:52]

80.000

1417.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:54]

80.000, iki yang ter anu, ya, tersebar di kecamatan-kecamatan yang tadi sudah disebutkan.

1418.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:11:03]

Ya, menurut Pemohon, Yang Mulia.

1419.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:05]

Oke, menurut Pemohon. Jadi kesimpulannya (...)

1420.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:11:09]

Kemudian (...)

1421.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:10]

Harus ... Petitemnya gimana? Petitemnya kalau begitu?

1422.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:11:15]

PSU, Yang Mulia.

1423.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:16]

PSU.

1424.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:11:17]

Ya.

1425.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:17]

Ya, coba dibacakan Petitumnya.

1426.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:11:19]

Untuk Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, mengabulkan provinsi Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Aceh 1, sepanjang untuk pemilihan anggota DPR RI.

Dalam pokok perkara, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360.

1427.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:55]

Sebentar, sebentar. Permintaan PSU itu di mana? Di kecamatan ... 5 kecamatan di Dapil Aceh Timur 2?

1428.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:06]

Aceh Timur 1, Yang Mulia.

1429.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:08]

Lho, ini tulisannya 2 di sini, 1 atau 2? 1?

1430.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:14]

Ada dua permohonan, Yang Mulia.

1431.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:15]

Oke.

1432.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:16]

1, 2, ya.

1433.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:20]

Yang DPRK itu yang satunya, ya?

1434.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:22]

DPRK, satunya.

1435.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:23]

Oke, ya. Silakan, terus.

1436.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:27]

Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (...)

1437.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:42]

Oke.

1438.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:42]

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 1 untuk pengisian anggota DPR RI.

1439.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:50]

Oke.

1440.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:12:51]

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1, setelah dilakukan pemungutan suara ulang.

1441.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:01]

Ya. Terus sekarang yang kedua, untuk Dapil Aceh Timur 2, DPRK. Ya, ada, kan?

1442.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:13:11]

Ya, Yang Mulia.

1443.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:12]

Ada, silakan. Gimana itu?

1444.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSYAH [02:13:14]

Dilanjutkan oleh rekan Saya, Yang Mulia.

1445.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:15]

Oke, silakan.

1446.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:13:20]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1447.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:21]

Ya.

1448.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:13:23]

Untuk DPRK Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 2. Terdapat perbedaan selisih suara yang disandingkan antara C.Hasil DPRK wilayah versi Pemohon dengan D.Kabko wilayah menurut Termohon. Sebagaimana di tabel 3 halaman 20.

1449.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:50]

Ini sengketanya antara Gerindra dan Partai Aceh berarti, ya. Ya?

1450.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:13:56]

Benar, Yang Mulia.

1451.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:57]

Ya. Yang dipersoalkan berapa suara itu?

1452.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:02]

Yang dipersoalkan (...)

1453.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:10]

Gerindra mestinya memperoleh 7.145?

1454.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:14]

Benar.

1455.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:15]

Ya, kan?

1456.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:15]

Benar.

1457.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:16]

Terus, Aceh. Yang ditetapkan Termohon=32.925, mestinya menurut Pemohon hanya 18.000?

1458.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:25]

Benar, Yang Mulia.

1459.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:25]

Ya, kan?

1460.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:26]

Benar, Yang Mulia.

1461.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:27]

Sehingga ada penambahan suara untuk Aceh ... Partai Aceh=14.340.

1462.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:33]

Benar, Yang Mulia.

1463.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:35]

Oke. Dari situ kemudian perolehan kursinya, Aceh 5 kursi, Gerindra dapat 1, menjadi 2. Partai Aceh kemudian hanya ... anu ... mendapat 4 kursi, gitu toh?

1464.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:49]

Benar, Yang Mulia.

1465.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:50]

Oke. Sekarang Petitumnya, kalau begitu. Ini tersebar di berapa kecamatan ini?

1466.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:14:58]

Di 5 kecamatan, Yang Mulia.

1467.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:00]

5 kecamatan, Peureulak, Rantau Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Sungai Raya.

1468.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:15:05]

Sungai Raya.

1469.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:06]

Oke, ini dengan total suara itu tadi, ya?

1470.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:15:09]

Benar, Yang Mulia.

1471.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:10]

Oke. Petitumnya.

1472.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:15:14]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada kecamatan Peureulak, Rantau Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Sungai Raya, di Dapil Aceh Timur 2.

1473.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:57]

Oke.

1474.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:12:58]

Atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar, menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, sebagaimana tabel berikut.

1475.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:11]

Ya.

1476.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:16:13]

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pemohon.

1477.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:28]

Ini bisa dilakukan penghitungan, bisa langsung ditetapkan, ya, permintaannya, ya?

1478.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:16:34]

Benar, Yang Mulia.

1479.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:35]

Ok. Prof. Enny ada? Silakan, Prof.

1480.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:16:39]

Ya, baik. Ini yang pertama untuk DPR RI, ya, Dapil Aceh 1. Ini kan kebetulan dengan PDIP dan PKS, ya. Yang disandingkan C-1 sama C-1 dan D.Hasil, ya. Untuk yang ini, yang seluruhnya ini. Ini TPS-nya sudah di ... ini TPS-nya sudah semua nih? Sudah ada bukti di TPS-TPS mana saja nih, disandingkannya ini? Ini kan baru menunjuk nama orangnya, ya. TPS-nya enggak ada ini?

1481.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:17:15]

Di tabel memang tidak ada, Yang Mulia.

1482.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:17]

Tidak ada, di bukti ada nanti?

1483.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:17:18]

Bukti ada.

1484.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:19]

Tolong dicek ya, nanti buktinya lengkap semua, ya.

1485.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:17:21]

Siap, Yang Mulia.

1486.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:22]

Di TPS mana saja. Kemudian dari Bawaslu, sudah ada rekomendasi, ya? Tidak ditindak lanjut di rekomendasi Bawaslu? Ya, betul enggak?

1487.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:17:31]

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

1488.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:32]

Ada pelanggaran administratif. Ini tolong Bawaslu nanti, ya, direspons, ya, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 003, ya.

Kemudian Petitemnya, ini minta dari Pemohon penambahan, ya, artinya penetapan untuk angka yang 104 dan seterusnya, 104.000 itu, ya untuk Gerindra, ditambah hasil PSU. DPT-nya berapa di situ kalau begitu? Ditambah dengan hasil PSU-nya. Jadi angka yang sudah ada ini ditambah dengan hasil PSU, maksudnya begitu?

1489.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:18:04]

Ya, Yang Mulia. Untuk (...)

1490.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:05]

Itu DPT-nya berapa tuh nanti? Kalau hasil PSU, ini kan sudah hasil ... sudah ada DPT sendiri, 104 itu, 104.000 itu. Diminta untuk dengan tambah hasil PSU. Tolong nanti dicek, ya.

1491.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [02:18:16]

Siap, siap.

1492.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:17]

DPT-nya berapa dari Dapil Aceh 1, ya. Kalau melebihi DPT kan enggak boleh itu. Dicek dulu DPT-nya berapa? Kemudian suara sahnya berapa? Suara tidak sahnya berapa? Tolong nanti KPU juga merespons, ya, dengan lengkap soal ini, ya.

Kemudian yang di ... Dapil Aceh Timur 2 untuk keanggotaan DPRK, itu di TPS mana saja itu? Yang perolehan suaranya untuk

Peureulak, Rantau Peureulak, dan seterusnya sekian itu, sudah ada uraiannya?

1493.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:18:47]

Ada uraiannya di bukti, Yang Mulia.

1494.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:49]

Bukti ada? Pakai apa buktinya?

1495.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:18:51]

Antara lain menggunakan D.Hasil.

1496.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:53]

Oh D.Hasil, C-nya, ada C.Hasilnya?

1497.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:18:56]

C.Hasil ada.

1498.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:57]

Tolong disandingkan nanti, ya.

1499.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:18:58]

Kami sandingkan nanti.

1500.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:59]

Ya, tolong disandingkan keduanya itu untuk melihat bukti perolehannya seperti itu, ya. Saya kira itu, yang kemudian Anda minta untuk dilakukan PSU atau kemudian penetapan yang benar, ya. Ada alternatif di sini.

Itu saja, Pak Ketua.

1501.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:15]

Terima kasih Prof. Enny. Cukup, ya, Pemohon? Jadi untuk Termohon dan Pihak Terkait supaya direspons, ya, ini Permohonannya.

Untuk DPR RI, Dapil Aceh 1, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-40, betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk DPRK, Dapil Aceh Timur 2, P-1 sampai dengan P-333?

1502.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:19:47]

Betul, Yang Mulia.

1503.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:48]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang akan disampaikan Pemohon? Cukup?

1504.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:19:58]

Cukup, Yang Mulia.

1505.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:59]

Baik, terima kasih. Yang terakhir untuk sesi ini, Perkara 144.

1506.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:20:08]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, kami dari Tim Advokasi Partai Aceh, khususnya Dapil Aceh Utara 6 ... eh, Aceh Utara 5, Yang Mulia, maaf. Sebelumnya, saya sampaikan Permohonan dan Perbaikan Permohonan, sama halnya seperti Partai Adil Sejahtera Aceh 6.

Perbaikan ... Permohonan dan Perbaikan Permohonan merupakan satu kesatuan yang utuh, Yang Mulia.

1507.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:47]

Ya, dilanjutkan.

1508.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:20:48]

Ya, mengenai (...)

1509.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:50]

Untuk besok lain kali Kuasa Hukum, ini kalau ada perbaikan begini ... gabung, ya.

1510.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:20:54]

Baik, Yang Muia.

1511.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:54]

Jangan dipisah begini jadinya, ya.

1512.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:20:56]

Ya.

1513.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:57]

Jadi, Termohon, Pihak Terkait, kalau ada, yang direspons adalah dua Permohonan ini, Permohonan awal dan Perbaikan permohonannya, ya. Silakan.

1514.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:10]

Terima kasih. Selanjutnya mengenai identitas Permohon, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan.

1515.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:21]

Ya.

1516.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:21]

Kedudukan Pemohon. Izin, Yang Mulia, izin renvoi di poin 3.

1517.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:27]

Apa itu?

1518.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:27]

Yang di poin akhirnya, Yang Mulia.

1519.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:30]

Ya.

1520.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:31]

Itu dengan Nomor Urut 1, seharusnya itu dengan Nomor Urut 21, Yang Mulia.

1521.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:37]

Oke, hanya kekeliruan anunya (...)

1522.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:39]

Kekelliruan dalam pengetikan, Yang Mulia.

1523.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:37]

Nomor urut partainya, ya?

1524.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:41]

Ya.

1525.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:42]

Tapi sebetulnya partainya Partai Aceh?

1526.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:44]

Ya, Partai Aceh.

1527.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:45]

Oke, kalau begini bisa direnvoi.

1528.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:46]

Oke.

1529.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:47]

Ya.

1530.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:21:48]

Mengenai tenggat waktu, Permohonan ini di ... diajukan pada tanggal 23 Maret 2024.

1531.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:58]

Masih dalam tenggat waktu, ya?

1532.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:00]

Masih dalam tenggat waktu dan perbaikan diajukan pada tanggal 26, Yang Mulia.

1533.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:03]

Ya, masih tenggat waktu.

1534.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:07]

Pokok Permohonan, perolehan (...)

1535.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:12]

Ini, yang dipersoalkan di Dapil Aceh Utara 5, ya?

1536.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:15]

Dapil Aceh Utara 5, Yang Mulia.

1537.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:16]

Ya.

1538.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:17]

Khususnya untuk di Kecamatan Syamtal ... Syamtalira Aron dan Tanah Pasir, Yang Mulia.

1539.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:22]

Ya.

1540.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:24]

Ini baik saya bacakan untuk perolehan suaranya.

1541.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:27]

He eh.

1542.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:29]

Yang kita permasalahan itu, Yang Mulia, itu untuk caleg di Nomor Urut 2.

1543.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]

Abdul Muthaleb?

1544.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:36]

Abdul Muthaleb.

1545.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:37]

He eh.

1546.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:38]

Dan kita mewakili Pemohon di caleg Nomor Urut 5, Yang Mulia.

1547.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:42]

Muntasir

1548.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:42]

Muntasir. Itu suara ... suara Termohon, versi dari Termohon itu 3.887, Yang Mulia. Sementara itu menurut Pemohon untuk suara Abdul Muthaleb didapatkan 2.924 suara, Yang Mulia

1549.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:04]

Jadi, ada penambahan suara 6 ... 963 (...)

1550.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:07]

963.

1551.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:08]

Kemudian Muntasir?

1552.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:09]

Sementara untuk Muntasir, 3.534, itu versi Termohon. Sementara versi dari Pemohon itu adalah 3.581.

1553.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:21]

Jadi, ada kekurangan 47 suara.

1554.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:22]

Ada kekurangan sekitar 47 suara, Yang Mulia.

1555.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:27]

Ya. Itu di mana tadi?

1556.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:29]

Itu di Kecamatan Syamtalira Aron dan Tanah Pasir, Yang Mulia. Rinciannya ada di (...)

1557.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:35]

Dapil Aceh Utara 5 itu, ya?

1558.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:37]

Kita cantumkan di Permohonan ini. Ya.

1559.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:39]

Ya, terus?

1560.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:40]

Terus, izin, satu lagi, renvoi masih di halaman 4, itu di penamaan tabel, Yang Mulia.

1561.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:47]

Ya.

1562.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:48]

He eh. Itu MH pertama, itu seharusnya itu Termohon. MH kedua, itu Pemohon, Yang Mulia.

1563.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:56]

Oke.

1564.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:57]

He eh. Sama satu lagi itu mengenai selisih, Yang Mulia. Selisih di poin ... tapi sebenarnya mengenai nilai, nilai suaranya itu tidak ada ... tidak ada perbedaan, Yang Mulia. Cuma di selisihnya yang ada perbedaan, di ... mulai dari Caleg Nomor Urut 6 sampai 9, Yang Mulia. Di selisih. Kolom selisih, Yang Mulia. Yang 47 (...)

1565.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:28]

Tapi di kolom anunya Termohon dan Pemohon enggak beda, ya?

1566.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:31]

Beda, Yang Mulia.

1567.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:32]

Ha?

1568.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:33]

Beda.

1569.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:34]

Bedanya yang di mana itu?

1570.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:36]

Ini yang Muntasir kan sama halnya seperti yang di atas. Itu selisihnya itu yang tertulis kan minus 47.

1571.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:43]

He eh.

1572.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:44]

Seharusnya itu minus 24, Yang Mulia.

1573.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:47]

Ya, kalau yang di angka perolehan Termohon dan Pemohon enggak berubah, kan?

1574.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:53]

Tidak berubah, Yang Mulia.

1575.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:54]

Hanya ngitung di selisihnya saja?

1576.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:55]

Ya, kesalahan dalam penghitungan, Yang Mulia.

1577.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:58]

Oke. Ya, ini kan 46 sama 6 ... 47.

1578.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:06]

Ya.

1579.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:07]

Selisihnya 1. 40 sama 64.

1580.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:12]

Selisihnya yang tertulis di sini (...)

1581.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:13]

47.

1582.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:14]

47. Seharusnya minus 24.

1583.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:16]

Seharusnya 24 saja.

1584.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:18]

He eh. Yang Cut Inayati itu kan tertulis di selisih (...)

1585.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:24]

3 dan ... 0, 3, selisih 9.

1586.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:26]

Ya.

1587.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:27]

Mestinya berapa?

1588.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:28]

Seharusnya, mestinya 3, Yang Mulia.

1589.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:30]

Ha?

1590.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:31]

3. Minus 3.

1591.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:32]

Minus 3 saja, kan?

1592.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:33]

Ya. Yang di nomor 8 itu tertulis 428, seharusnya minus 162.

1593.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:45]

Oke.

1594.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:46]

Terus yang terakhir, yang tertulis minus 336, seharusnya itu minus 88, Yang Mulia.

1595.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:55]

24 sama 112 kan itu?

1596.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:57]

Ya, benar.

1597.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:58]

Berapa jadinya?

1598.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:59]

Seharusnya minus 88.

1599.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:02]

88, ya.

1600.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:03]

He eh.

1601.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:07]

Ya. Ada lagi?
Ini perincian di kecamatan dan TPS-nya, berarti, ya?

1602.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:14]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1603.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:16]

Ya. Kemudian yang di Aceh Utara 5 itu apa ini?

1604.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:23]

Maksudnya, Yang Mulia?

1605.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:25]

Ini semuanya perincian yang menyangkut apa yang sudah didalihkan di depan, ya?

1606.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:30]

Ya.

1607.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:46]

Terus kemudian yang berikutnya, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara, Dapil Utara 5 gimana itu?

1608.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S CHA NIAGO [02:26:56]

Nah.

1609.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:58]

Ini persoalan lain lagi kan? Dapilnya.

1610.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:02]

Ya, Yang Mulia.

1611.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:03]

Dapil Aceh Utara 5 untuk pengisian anggota DPRK Aceh Utara.

1612.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:08]

Ya, untuk kursi kedua, Yang Mulia.

1613.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:10]

Ya. Gimana ini? Itu Mas Muthaleb suara yang benar (...)

1614.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:19]

Jadi.

1615.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:23]

2.924. Muntasir yang benar 3.000 (...)

1616.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:24]

Muntasir yang benar, 3.581.

1617.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:25]

3.581.

1618.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:26]

He eh.

1619.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:29]

Berarti dia menduduki urutan yang pertama.

1620.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:31]

Urutan ke-2, Yang Mulia. Ini untuk perolehan kursi ke-2, Yang Mulia.

1621.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:34]

Oh, untuk kursi ke-2.

1622.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:36]

Dari Partai Aceh.

1623.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:37]

Yang pertama itu berarti diperoleh oleh Muhibbuddin?

1624.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:40]

Ya, benar, Yang Mulia.

1625.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:42]

Oh, Muhibbuddin, ya. Petitumnya, coba dibacakan.

1626.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:57]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan ini sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua (...)

1627.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:09]

Itu Petitumnya di anu, ya, Permohonan awal, ya?

1628.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:28:12]

Ya, benar, Yang Mulia.

1629.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:13]

Ya. Terus, silakan.

1630.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:28:16]

Dua, membatalkan kepu ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan selanjutnya dianggap sudah dibacakan, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut. Dapil Aceh 5 untuk pengisian calon anggota DPRK Aceh Utara.

Tiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 dari Partai Aceh sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5.

1631.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:54]

Ya, terus.

1632.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:28:54]

Satu, Razali=2.673 suara. Dua, Abdul Muthaleb=2.924 suara. Tiga, Rozaliana=376 suara. Empat, Muhi ... Muhibbudin=3.842 suara. Lima, Muntasir=3.581 suara. Enam, Cut Inayati=16 suara. Tujuh, Feriadi=1.460 suara. Dan, delapan, Adnan=587 suara.

Dengan perolehan kursi kedua Partai Aceh ditetapkan untuk calon legislatif Nomor Urut 5 yang bernama Muntasir, S.Sos., dengan perolehan suara ... dengan perolehan suara badan 3.581 suara.

Empat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terimakasih, Yang Mulia.

1633.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:00]

Baik. Prof Enny ada? Cukup.

Ya, ini Pemohon atau Kuasanya yang anu ini ... waktu sekolah SD enggak lulus matematikanya ini, ya, kan? Masa 29 dikurangi 191 jadi 4.28, 03 dikurangi 3 menjadi 9, 40 dikurangi 64 jadi 47. Waktu SD enggak lulus matematikanya ini, tapi untung sudah dianu ... diralat. Jadi itu karena uraiannya betul, tapi konklusinya yang salah, maka bisa dianu, ya, dibetulkan, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-51, betul?

1634.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:30:50]

Ya, benar, Yang Mulia.

1635.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:51]

Sudah diverifikasi (...)

1636.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:30:51]

Izin, Yang Mulia.

1637.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:53]

Apa lagi?

1638.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:30:54]

Itu untuk kita renvoi untuk urutan nomor bukti, Yang Mulia.

1639.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:58]

Urutan nomor bukti?

1640.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:00]

He eh.

1641.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:01]

Gimana apa yang dimaksud itu?

1642.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:02]

Jadi ... jadi ada ... ada kekeliruan dalam pencantuman alat bukti, Yang Mulia. Itu mulai dari P-19, itu ada semacam pergeseran nomor-urutnya, Yang Mulia.

1643.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:15]

Coba saya (...)

1644.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:17]

Seharusnya P-20 itu P-19, mulai dari P-19.

1645.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:22]

Sebentar, sebentar, dilihat buktinya dulu. Tapi keseluruhan P-1 sama dengan P-51, betul?

1646.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:31]

Ya, benar, Yang Mulia.

1647.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:33]

Tapi ada perubahan apanya, urutannya?

1648.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:36]

Ada urutan.

1649.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:37]

Urutannya gimana yang betul?

1650.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:40]

Jadi ada kekeliruan dalam penginputan, P-19 itu sebenarnya tidak ada, Yang Mulia, di Permohonan. P-19 khususnya C.Hasil Desa Tanjung Rumpaseh.

1651.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:54]

Oh, Bukti P-19 itu, sebetulnya?

1652.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:31:58]

Yang di daftar alat bukti itu sebenarnya tidak ada, Yang Mulia.

1653.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:00]

Oke.

1654.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:00]

He em.

1655.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:01]

Sudah dikoreksi, ya. Nah, itu tadi nanti diperbaiki, ya.

1656.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:09]

Baik, Yang Mulia.

1657.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:09]

Harus dilabel ulang, ya.

1658.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:11]

Ya, baik, Yang Mulia.

Perbaikannya kita juga sudah, apa nanti ... nanti kita lihat lagi.

1659.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:17]

Coba lihat perbaikannya kayak apa? Bawa sini coba. Ada perbaikannya? Atau nantilah, ke Kepaniteraan.

1660.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:23]

Baik, Yang Mulia.

1661.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:24]

Ya, ini juga sudah dikoreksi kita, Pak anu nih, ada catatan-catatan ini. Ya, nanti dengan Kepaniteraan, ya.

1662.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:32]

Baik, Yang Mulia.

1663.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:32]

Ya, makanya itu kayaknya matematikanya enggak cocok ini. Tapi secara keseluruhan P-1 sampai dengan P-51?

1664.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:42]

Ya.

1665.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:43]

Baik, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

1666.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:32:50]

Cukup, Yang Mulia.

1667.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:50]

Cukup, baik. Jadi, persidangan yang diadakan pada pukul 08.00 WIB sampai sekarang sudah selesai. Kemudian perlu saya sampaikan, bukti tambahan masih bisa disampaikan sampai paling lambat pukul 13.00 WIB. Langsung diserahkan di Kepaniteraan, semuanya sudah dilengkapi dengan pelabelan dan legesnya, ya. Jangan belum dilabel, nanti semakin kacau.

Kemudian nanti agendanya sidang berikutnya adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditambah bukti tambahan yang baru dimasukkan sebelum pukul 13.00 WIB masih bisa disahkan, ya. Oke.

Penundaan sidangnya begini, Perkara Nomor 153, 36, 62, 161, 175, dan 39 itu diadakan Selasa, 7 Mei 2024, pada pukul 13.30 WIB, ya.

Makanya itu jangan ngomong sendiri. Perkara 153, 36, 62, 161, 175, dan 39. Saya ulangi, 153, 36, 62, 161, 175, dan 39. Selasa, 7 Mei 2024, pada Pukul 13.30 WIB. Dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti semuanya, termasuk yang tambahan dari Para Pemohon. Ini disampaikan sebagai undangan resmi, jadi tidak ada undangan lagi, ini panggilan resmi sudah dilakukan.

Kemudian yang berikutnya, penundaan sidang, Perkara 54, 168, 16, 121, 25, 13, dan 144. Saya ulangi, 54, 168, 16, 121, 25, 13, dan

144, pada hari Rabu, 8 Mei 2024, pada Pukul 08.00 WIB. Dengan agenda yang sama, mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.

Ya, sudah bisa diterima, dimengerti? Pemohon semuanya? Cukup, ya?

1668.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:35:58]

Izin, Yang Mulia.

1669.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:59]

Mana? Silakan.

1670.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:00]

Mengenai Perkara Nomor 13. Kami sebagai Pemohon, setelah membaca tabel 3 pada halaman 21 ada typo, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

1671.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:14]

Kok baru sekarang?

1672.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:18]

Ya, baru kami baca lagi, Yang Mulia.

1673.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:21]

Typo-nya, typo gimana?

1674.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:22]

Jadi, di halaman 21 kolom tabel 3 seharusnya keterangan Pemohon itu sebagai Termohon, Yang Mulia. Terbalik.

1675.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:36]

Di situ tertulis keterangan Pemohon, sebetulnya Termohon?

1676.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:40]

Betul.

1677.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:00]

Nanti kita lihat, kita pertimbangkan.

1678.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:44]

Ya.

1679.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:44]

Ya.

1680.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:45]

Demikian juga, Yang Mulia, izin, Termohon sebagai Pemohon, Yang Mulia, maksudnya.

1681.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:50]

Terbalik, ya?

1682.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:36:51]

Ya.

1683.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:58]

Ya, itu salah ngetiknya, ya? Ini sudah dibaca ini.

1684.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:37:02]

Baik.

1685.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:03]

Malah lebih tahu kita daripada Pemohonnya.

1686.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:37:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

1687.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:07]

Masih harus banyak belajar itu.

1688.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:37:09]

Siap.

1689.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:10]

Terus ini staf kita itu pinter-pinter. Doktor-doktor semua ini, ya. Kalau Hakimnya profesor semua. Enggak sombong, tapi emang kayak kenyataannya, begitu. Ya, dari Pemohon cukup, ya? Cukup.

Termohon? Cukup? Bawaslu? Eh apa yang di belakang? Apa? Silakan. Ya, pakai mik. Sudah-sudah pakai mik itu sudah.

1690.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:37:47]

Kebetulan dalam sidang hari ini, kantor kami menangani 3 perkara.

1691.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:54]

Ya.

1692.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:37:54]

Jadi, 3 perkara ini sebetulnya masing-masing perkara ditangani oleh Kuasa Hukum sendiri-sendiri.

1693.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:00]

Ya.

1694.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:38:00]

Jadi, namun dalam persidangan hanya satu. Dalam satu kantor itu hanya satu yang boleh mewakili masuk kantor peng ... kantor ... mau masuk di persidangan ini.

1695.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:11]

Ya.

1696.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:38:11]

Oleh karena itu, kami berharap kalau nanti di dalam jawaban, sesi jawaban, karena perkara itu (...)

1697.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:17]

Oh, itu nanti yang nangani sendiri-sendiri.

1698.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:38:19]

Ya, nangani sendiri-sendiri. Kami minta supaya (...)

1699.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:21]

Nanti disampaikan ke Petugas di luar, ya.

1700.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:38:24]

Baik, baik.

1701.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:25]

Ya.

1702.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:38:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

1703.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:28]

Ya, nanti disampaikan di luar bahwa ini ada tugas yang di ... ter-split, ya, kan? Nanti disampaikan sendiri-sendiri, kan? Ya.

1704.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:38:36]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1705.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:38]

Sampai ... disampaikan di luar nanti, oke. Dari Pihak Terkait, cukup jelas, kan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, ya.

Terima kasih. Kalau begitu sidang sesi pertama ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.41 WIB

Jakarta, 30 April 2024
Panitera,
Muhidin

